



RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
PROVINSI RIAU
TAHUN 2017-2019



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
2018



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PROVINSI RIAU TAHUN 2017 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan; perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar; kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, dan gender; akses terhadap keadilan; perbaikan kualitas lingkungan hidup; serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaan, melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif;
- b. bahwa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia diperlukan peran aktif dan dukungan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk Rencana Aksi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Riau Tahun 2017 - 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* Provinsi Riau yang selanjutnya disebut dengan RAD TPB/SDGs Provinsi Riau adalah dokumen rencana aksi yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Riau dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Aktor Pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indicator tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.
- (2) Aktor Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Organisasi kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* berisi 17 (tujuh belas) tujuan yang meliputi :
 - a. tanpa kemiskinan;
 - b. tanpa kelaparan;
 - c. kehidupan sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan berkualitas;
 - e. kesetaraan gender;
 - f. air bersih dan sanitasi layak;
 - g. energi bersih dan terjangkau;
 - h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 - i. industri, inovasi dan infrastruktur;
 - j. berkurangnya kesenjangan;
 - k. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
 - l. konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
 - m. penanganan perubahan iklim;
 - n. ekosistem lautan;
 - o. ekosistem daratan;
 - p. perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan
 - q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Riau dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN SDGs

BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN
TPB/SDGs

BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Juni 2018



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
SETDA
H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR

KATA PENGANTAR

Indonesia berkomitmen melaksanakan agenda SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor: 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan semangat nasional, Provinsi Riau berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditegaskan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: 187/II/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Riau Tahun 2017 – 2019.

Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama dengan seluruh aktor pembangunan dari berbagai unsur baik pelaku usaha, filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media dan kelompok masyarakat telah menyusun Rencana Aksi Daerah SDGs yang disusun dalam bentuk narasi dan matrik yang menggambarkan rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai seluruh target SDGs pada tahun 2030 mendatang. Dokumen RAD SDGs ini merupakan pijakan dan panduan bagi semua aktor pembangunan dalam rangka merubah misi menjadi aksi nyata. Dengan adanya dokumen RAD SDGs ini, diharapkan dapat membuat lebih fokus seluruh upaya bersama semua pihak dan mempercepat pencapaian target SDGs di Provinsi Riau.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Terima kasih kepada Tim Sekretariat SDGs Provinsi Riau yang telah membantu mempersiapkan draft awal dan memfasilitasi berbagai pertemuan hingga terselesaikannya draft RAD SDGs Provinsi Riau.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan secara khusus kepada UNDP Indonesia atas bantuan teknisnya dan kepada Tanoto Foundation atas dukungan anggaran dalam pelaksanaan SDGs di Provinsi Riau.

Pekanbaru, 5 Juni 2018

H. WAN THAMRIN HASYIM

Plt. Gubernur Riau

DAFTAR ISI

BAB I.....	14
PENDAHULUAN	14
1.1. Keselarasan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> Terhadap Misi RPJMD Riau	14
1.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs	15
1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	16
1.4. PembiayaanTPB/SDGs	17
1.4.1. Optimalisasi Penerimaan Daerah.....	17
1.4.2. Sumber Pembiayaan Non-Pemerintah.....	17
1.4.3. Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	18
1.5. Metode Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.....	18
1.6. Sistematika Rencana Aksi Daerah	24
BAB II.....	25
KONDISI PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	
PELAKSANAAN TPB/SDGs	25
2.1. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs	25
2.1.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun	25
2.1.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	26
2.1.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	28
2.1.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua.....	30
2.1.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan ...	32
2.1.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	33
2.1.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua.....	35
2.1.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan..	36
2.1.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	40
2.1.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara.....	43

2.1.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan.....	43
2.1.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.....	46
2.1.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan.....	47
2.1.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	48
2.1.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	51
2.1.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	53
2.1.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global ..	55
2.2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	57
2.2.1. Permasalahan dan Tantangan Pilar Sosial	57
2.2.2. Permasalahan dan Tantangan Pilar Ekonomi	59
2.2.3. Permasalahan dan Tantangan Pilar Lingkungan	61
2.2.4. Permasalahan dan Tantangan Hukum dan Tata Kelola.....	62
BAB III	65
TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs	65
3.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun	65
Target dan Indikator Tujuan 1 TPB/SDGs	65
Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs	68
Program Tujuan 1 TPB/SDGs	68
3.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	69
Target dan Indikator Tujuan 2TPB/SDGs	69
Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 2 TPB/SDGs	71
Program Tujuan 2 TPB/SDGs	71
3.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	72
Target dan Indikator Tujuan 3TPB/SDGs	72
Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs	76
Program Tujuan 3 TPB/SDGs	76
3.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua.....	77
Target dan Indikator Tujuan 4 TPB/SDGs	77

	Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs	79
	Program Tujuan 4 TPB/SDGs	79
3.5.	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	80
	Target dan Indikator Tujuan 5 TPB/SDGs	80
	Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs	82
	Program Tujuan 5 TPB/SDGs	82
3.6.	Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	83
	Target dan Indikator Tujuan 6 TPB/SDGs	83
	Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs	87
	Program Tujuan 6 TPB/SDGs	87
3.7.	Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua	88
	Target dan Indikator Tujuan 7 TPB/SDGs	88
	Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 7 TPB/SDGs	88
	Program Tujuan 7 TPB/SDGs	88
3.8.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	89
	Target dan Indikator Tujuan 8 TPB/SDGs	89
	Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs	91
	Program Tujuan 8 TPB/SDGs	92
3.9.	Arah Kebijakan Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.....	93
	Target dan Indikator Tujuan 9 TPB/SDGs	93
	Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 9 TPB/SDGs	94
	Program Tujuan 9 TPB/SDGs	95
3.10.	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara.....	95
	Target dan Indikator Tujuan 10 TPB/SDGs.....	95
	Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 10 TPB/SDGs	97
	Program Tujuan 10 TPB/SDGs	98
3.11.	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	98
	Target dan Indikator Tujuan 11 TPB/SDGs.....	98
	Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs	101

Program Tujuan 11 TPB/SDGs	102
3.12. Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	102
Target dan Indikator Tujuan 12 TPB/SDGs	102
Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs	104
Program Tujuan 12 TPB/SDGs	104
3.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	104
Target dan Indikator Tujuan 13 TPB/SDGs	104
Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs	105
Program Tujuan 13 TPB/SDGs	105
3.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	106
Target dan Indikator Tujuan 14 TPB/SDGs	106
Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs	108
Program Tujuan 14 TPB/SDGs	108
3.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	108
Target dan Indikator Tujuan 15 TPB/SDGs	108
Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs	110
Program Tujuan 15 TPB/SDGs	110
3.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	110
Target dan Indikator Tujuan 16 TPB/SDGs	111
Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs	116
Program Tujuan 16 TPB/SDGs	116
3.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	117
Target dan Indikator Tujuan 17 TPB/SDGs	117
Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs	119
Program Tujuan 17 TPB/SDGs	120
BAB IV	121
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	121
4.1. Landasan Hukum	121
4.2. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi	121
4.3. Tujuan/Kegunaan Pemantauan Dan Evaluasi	122

4.4. Waktu Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi.....	123
4.5. Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi	123
4.6. Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Pihak Non Pemerintah	126
4.7. Publikasi Hasil Pemantauan Dan Evaluasi.....	128
BAB V	129
PENUTUP	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Kapasitas Produksi Perusahaan Air Bersih Di Provinsi Riau	34
Tabel 2.	Produksi Perusahaan Air Bersih menurut Sumber Air yang Digunakan di Provinsi Riau tahun 2011 – 2015 (m ³).....	34
Tabel 3.	Jumlah Pelanggan, Volume dan Nilai Air Bersih yang Disalurkan menurut Jenis Pelanggan di Provinsi Riau, 2015	35
Tabel 4.	Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015.....	39
Tabel 5.	Perkembangan Koperasi Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015	39
Tabel 6.	Jumlah Pelabuhan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015	41
Tabel 7.	Perkembangan Sektor Industri Provinsi Riau Tahun 2009-2013	42
Tabel 8.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Jasa Komunikasi di Provinsi Riau Tahun 2010-2014	42
Tabel 9.	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Tahun 2009 – 2013.....	44
Tabel 10.	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Tahun 2009 – 2013.....	45
Tabel 11.	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Tahun 2009 – 2013.....	46
Tabel 12.	Perubahan IKLH Provinsi Riau dalam periode 2011-2016	47
Tabel 13.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sumatera Tahun 2016.....	48
Tabel 14.	Perkembangan Produksi Tahun 2009-2013 (ton)	49
Tabel 15.	Potensi perikanan dan kelautan Provinsi Riau	50
Tabel 16.	Luas Hutan Menurut Fungsi Tahun 2015 Berdasarkan TGHK Update SK Nomor: 878/Menhut II/2014.....	52
Tabel 17.	Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Riau Tahun 2011 -2015	52
Tabel 18.	Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014.....	53
Tabel 19.	Jumlah Lapas, Rutan, Rumah Tahanan menurut Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2014.....	54

Tabel 21. Jumlah Investor PMDN dan PMA Provinsi Riau Tahun 2011-2015.....	56
Tabel 22. Target dan indikator Tujuan 1 SDGs Provinsi Riau	65
Tabel 23. Target dan indikator Tujuan 2 SDGs Provinsi Riau	69
Tabel 24. Target dan indikator Tujuan 3 SDGs Provinsi Riau	72
Tabel 25. Target dan indikator Tujuan 4 SDGs Provinsi Riau	77
Tabel 26. Target dan indikator Tujuan 5 SDGs Provinsi Riau	80
Tabel 27. Target dan indikator Tujuan 6 SDGs Provinsi Riau	83
Tabel 28. Target dan indikator Tujuan 7 SDGs Provinsi Riau	88
Tabel 29. Target dan indikator Tujuan 8 SDGs Provinsi Riau	89
Tabel 30. Target dan indikator Tujuan 9 SDGs Provinsi Riau	93
Tabel 31. Target dan indikator Tujuan 10 SDGs Provinsi Riau	96
Tabel 32. Target dan indikator Tujuan 11 SDGs Provinsi Riau	98
Tabel 33. Target dan indikator Tujuan 12 SDGs Provinsi Riau	103
Tabel 34. Target dan Indikator Tujuan 13 SDGs Provinsi Riau.....	104
Tabel 35. Target dan indikator Tujuan 14 SDGs Provinsi Riau	106
Tabel 36. Target dan indikator Tujuan 15 SDGs Provinsi Riau	109
Tabel 37. Target dan indikator Tujuan 16 SDGs Provinsi Riau	111
Tabel 38. Target dan indikator Tujuan 17 SDGs Provinsi Riau	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Antara Waktu Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Riau Tahun 2011-2016	26
Gambar 2. Perkembangan Antara Waktu Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Riau Tahun 2011-2016	27
Gambar 3. Perkembangan Rasio Produksi dan Konsumsi Beras, Jagung, Sayuran dan Buah-Buahan, Ruminansia, Unggas dan Ikan Provinsi Riau, 2010-2015	28
Gambar 4. Rasio Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2011– 2015	29
Gambar 5. Rasio Dokter Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015	30
Gambar 6. Rasio Murid/Siswa Terhadap Ketersediaan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015	31
Gambar 7. Rasio Murid/Siswa Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2011-2015	31
Gambar 8. Rasio Murid/Siswa Perempuan Terhadap Laki-Laki Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2011-2015	33
Gambar 9. Jumlah Energi Listrik Yang Diproduksi, Dibeli dan Diterima Dari Unit Lain di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014	35
Gambar 10. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2010-2015	37
Gambar 11. PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2011-2015.....	38
Gambar 12. Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2010-2015	43
Gambar 13. Persentase Penanganan Sampah Kota Pekanbaru.....	47
Gambar 14. Jumlah Titik Api Tahun 2010 – 2016 di Provinsi Riau	48
Gambar 15. Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaian Provinsi Riau Tahun 2010-2014..	54
Gambar 16. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB Provinsi Riau.....	124
Gambar 17. Mekanisme evaluasi RAD TPB Provinsi Riau	125
Gambar 18. Alur Informasi Evaluasi untuk RAD TPBProvinsi Riau Non-Pemerintah	127

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Terhadap Misi RPJMD Riau

Pembangunan global yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda pembangunan global periode 2016-2030 sebagai transformasi Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals (MDGs)* untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. *SDGs* meneruskan prioritas-prioritas pembangunan *MDGs* yang meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. *SDGs* juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*). Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target *MDGs* Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. 17 tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam penyusunan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global, Pemerintah Indonesia terlibat secara langsung dan senantiasa mengupayakan masuknya kepentingan-kepentingan nasional yang strategis ke dalam agenda pembangunan

berkelanjutan. Agenda pembangunan nasional yang selaras dengan agenda pembangunan global ini merupakan kontribusi yang positif dari Indonesia sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Visi Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 adalah **sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020.** Visi jangka panjang tersebut diturunkan dalam RPJMD Provinsi Riau 2015-2019 yaitu **terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur.**

Untuk mencapai visi di atas, misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
4. Menurunkan Kemiskinan;
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik;
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa;
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan;
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata;
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau terkait dan selaras dengan agenda pembangunan yang berkelanjutan. Misi meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, menurunkan kemiskinan serta memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan terkait dan selaras dengan pilar sosial di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Misi meningkatkan infrastruktur dan pembangunan pertanian dan perkebunan serta peran serta swasta dalam pembangunan mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di pilar ekonomi. Pilar lingkungan di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan didukung oleh misi meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata. Misi mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik dan misi pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa terkait dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di pilar hukum dan tata kelola.

1.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya.

TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya

pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No One Left Behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Provinsi Riau mengikuti semangat nasional yang menjadikan SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada proses penyusunan dan dokumen Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Komitmen pelaksanaan SDGs di Indonesia diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai wujud implementasi di daerah, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 187/II/2017 tanggal

12 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Riau Tahun 2017 – 2019. Provinsi Riau merupakan pionir dalam pelaksanaan SDGs di tingkat provinsi walaupun peraturan pada tingkat nasional belum disahkan.

Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut telah disusun tim koordinasi pelaksanaan SDGs Provinsi Riau yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan kelompok kerja. Tim Pengarah diketuai oleh Gubernur, Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dan Tim Pokja dibagi berdasarkan pilar pembangunan SDGs yang diketuai oleh Kepala Bidang dan Sekretaris lingkup Bappeda Provinsi Riau.

Sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip inklusif SDGs, Tim Koordinasi SDGs Provinsi Riau disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah, pelaku usaha, filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan media. Sedangkan untuk membantu tugas dan fungsi Tim Koordinasi SDGs Provinsi Riau, dibentuk Sekretariat SDGs melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Riau.

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs

Sebagai daerah yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Pemerintah Provinsi Riau berupaya mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari :

1.4.1. Optimalisasi Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, pendapatan bukan pajak, transfer pemerintah pusat (DBH pajak dan bukan pajak), dan lainnya akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu, bahkan menjadi salah satu indikator SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan SDGs (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan karena Provinsi Riau mengalami penurunan penerimaan transfer seiring dengan penurunan harga minyak dunia dan berkurangnya *lifting* minyak mentah yang ada di daerah.

1.4.2. Sumber Pembiayaan Non-Pemerintah

Kedermawanan masyarakat Indonesia sangatlah tinggi, bahkan survei Gallup menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah Myanmar. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, Perpuluhan, Kolekte dan Dana Punia, mempunyai potensi yang sangat besar. Dari Zakat saja diperkirakan potensinya sekitar Rp 213 triliun/tahun namun baru tergalang kurang dari 2 persen, belum bila ditambahkan yang lainnya.

Kedermawanan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini juga terus berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari Rp 12 triliun per tahun. CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*” yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.

1.4.3. Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah

Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) & pasar uang (green bond), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme debt swap to SDGs, mekanisme impact investing, crowd financing, serta pembiayaan inovatif melalui blended finance (Pemerintah, Swasta, Filantropi).

Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan EBT serta konservasi energi mendukung pencapaian Tujuan 7.

1.5. Metode Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Sesuai dengan amanat Perpres No. 59 Tahun 2017 Tanggal 04 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa selambat-lambatnya dalam waktu dua belas bulan sejak disahkannya Perpres tersebut, Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi harus ditetapkan.

Tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Riau yang melibatkan seluruh aktor pembangunan di Provinsi Riau dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1.5.1. Pembentukan kelembagaan

Provinsi Riau telah membentuk kelembagaan pelaksana SDGs dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan di tingkat provinsi melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 187/II/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan SDGs Provinsi Riau Tahun 2017-2019 tertanggal 13 Februari 2017.

Pembentukan kelembagaan pelaksanaan SDGs dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang diawali melalui upaya membangun pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan pembangunan terhadap pentingnya keterlibatan dan kontribusi seluruh aktor untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan di dalam kerangka hasil SDGs. Adapun detail proses pembentukan kelembagaan pelaksana SDGs Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Workshop integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu Rabu-Kamis/18-19 Mei 2016 bertempat di Bappeda Provinsi Riau dengan mengambil tema “Peran stakeholders untuk pencapaian target daerah dalam kerangka agenda pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau”. Hari pertama (Rabu/18 Mei 2016) untuk peserta dari sektor pemerintah dan hari ke-dua (Kamis/19 Mei 2016) dengan peserta dari sektor non pemerintah. Secara keseluruhan, kegiatan ini dihadiri oleh 65 peserta dari unsur pemerintah dan 40 peserta dari unsur non-pemerintah yang terdiri dari: organisasi masyarakat (PW Muhammadiyah, PW Muslimat NU, PW Nasyiatul Aisyiah, dan Lembaga Adat Melayu Riau); LSM (LBH Pekanbaru, Yayasan SIKLUS, Yayasan Utama, FITRA Riau, dan PKBI); akademis/universitas (Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan/PKPB UIR, LPPM UMRI, dan Pusat Studi Gender UR); filantropi dan sektor usaha (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/GAPKI, Tanoto Foundation, BAZNAS, Bank Indonesia, dan Bank Riau Kepri); dan media (TVRI Stasiun Riau, RRI Pekanbaru, dan SMART FM Radio Pekanbaru).

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya kesepahaman dan kesepakatan semua pihak untuk dibentuknya kelembagaan pelaksanaan SDGs yang melibatkan semua unsur baik pemerintah maupun non pemerintah dengan bentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan SDGs yang dipimpin oleh kepala daerah dengan legalitas berbentuk Keputusan Gubernur. Untuk mengaktualisasi gagasan tersebut, selanjutnya Bappeda menyusun konsep paper kelembagaan pelaksanaan SDGs Provinsi Riau.

b. Penyusunan konsep kelembagaan pelaksanaan SDGs Provinsi Riau.

Mengakomodasi ide dan gagasan dari semua unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam kegiatan workshop sebelumnya, format kelembagaan SDGs di Provinsi Riau dibangun dalam bentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan SDGs yang dipimpin oleh Kepala Daerah, yang di dalamnya terdiri beberapa Kelompok Kerja berbasis isu pembangunan yang beranggotakan semua unsur termasuk unsur non-pemerintah. Adapun struktur organisasi tim koordinasi pelaksanaan SDGs tersebut terdiri dari:

- 1) Tim Pengarah yang diketuai oleh Gubernur Riau;
- 2) Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Riau; dan
- 3) Kelompok Kerja yang dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan pilar pembangunan SDGs yang terdiri dari:
 - a) kelompok kerja pilar pembangunan social,
 - b) kelompok kerja pilar pembangunan ekonomi,
 - c) kelompok kerja pilar pembangunan lingkungan, dan
 - d) kelompok kerja pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

Tim Koordinasi SDGs Provinsi Riau bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antara program non-pemerintah dengan program-program pembangunan pemerintah, menyusun rencana aksi SDGs secara bersama-sama, melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala dan memberikan supervisi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs. Untuk

menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, Tim Koordinasi ini dibantu oleh Sekretariat SDGs di Tingkat Provinsi yang berkedudukan di Bappeda Provinsi Riau dan dibentuk melalui keputusan Kepala Bappeda.

c. Konsultasi Publik Konsep Kelembagaan Pelaksanaan SDGs Provinsi Riau

Untuk memastikan kesesuaian konsep dengan kesepakatan awal serta dalam rangka mengakomodir ide dan gagasan serta keterlibatan semua pihak, Bappeda melakukan konsultasi publik atas draft konsep kelembagaan yang telah disusun. Konsultasi publik dilaksanakan selama empat hari dengan peserta dibagi berdasarkan sektor dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Senin, 01 Agustus 2017 dengan sektor komunitas, LSM dan media;
- 2) Selasa, 02 Agustus 2017 dengan sektor pemerintah;
- 3) Rabu, 03 Agustus 2017 dengan sektor bisnis dan filantropi, dan
- 4) Kamis, 04 Agustus 2017 dengan sektor akademisi dan lembaga internasional.

Dari rangkaian konsultasi publik tersebut di atas dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi disepakati terdiri dari pengarah, pelaksana dan kelompok kerja.
- 2) Keanggotaan kelompok kerja per-pilar ditentukan berdasarkan kesesuaian isu yang ditangani oleh masing-masing organisasi/instansi.
- 3) Keikutsertaan instansi/organisasi peserta kedalam kelompok kerja dilakukan dengan mengirimkan surat konfirmasi kesediaan keterlibatan dalam kelompok kerja dengan mencantumkan kontak person dan pilihan kelompok kerja.

d. Penyusunan Draft Keputusan Gubernur dan Pengesahannya.

Berdasarkan dokumen konsep kelembagaan dan mengacu pada hasil konsultasi publik, Bappeda Riau menyusun draft Keputusan Gubernur tentang tim koordinasi pelaksanaan SDGs Provinsi Riau. Dikarenakan pada saat penyusunan draft ini dilakukan belum keluar regulasi tentang pelaksanaan SDGs di tingkat nasional, maka pertimbangan hukum yang dijadikan landasan penyusunan keputusan adalah Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut ini dianggap paling relevan dengan pertimbangan bahwa esensi dari pelaksanaan SDGs adalah pengintegrasian kerangka hasil dan prinsip SDGs kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan implementasinya.

Susunan keanggotaan dari sektor non-pemerintah ditentukan berdasarkan ketertarikan masing-masing instansi pada pilar tertentu. Sedangkan dari unsur pemerintah, susunan keanggotaan ditentukan berdasarkan kesesuaian antara isu yang ditangani oleh organisasi perangkat daerah atau instansi dengan goal dan indikator SDGs.

Setelah draft Keputusan Gubernur tersusun, langkah selanjutnya yang diambil adalah harmonisasi draft oleh Biro Hukum. Draft yang telah diharmonisasi tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk ditandatangani. Surat Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Gubernur pada tanggal 13 Februari 2017 dan dikeluarkan dengan nomor Nomor: Kpts. 187/II/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan SDGs Provinsi Riau Tahun 2017-2019.

1.5.2. Kick off Meeting Penyusunan RAD TPB/SDGs

Pertemuan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi seluruh stakeholder tentang kerangka kerja SDGs, tugas dan fungsi kelembagaan, pemahaman peta keselarasan RPJMD dan SDGs, teknis penentuan indikator, dan menyepakati mekanisme dan penyusunan RAD TPB/SDGs.

Kick off meeting penyusunan RAD TPB/SDGs dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2017 dan dihadiri oleh 160 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha, philanthropi, LSM, media, organisasi masyarakat dan akademisi. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Bappeda Riau, dan menghadirkan tiga narasumber yaitu: 1) Dr. Rahman Kurniawan, Manager Pilar Lingkungan Sekretariat Nasional SDGs, 2) Dr. Azharuddin M Amin, Tenaga Ahli Penyusunan RAD SDGs Riau, dan 3) Rahmad Rahim, Kepala Bappeda Provinsi Riau.

1.5.3. Pemetaan keselarasan RPJMD Provinsi Riau 2015-2019 dan SDGs

Proses ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana telah ada kesesuaian antara indikator RPJMD Provinsi Riau dengan indikator global SDGs. Hasil pemetaan menunjukkan terdapat 12,86% indikator SDGs global yang sudah diadopsi (*matched*) ke dalam dokumen RPJMD, 25,73% indikator global SDGs yang dikategorikan mendekati (*proxy*) indikator RPJMD, dan terdapat 61,41% sisanya indikator SDGs global yang sama sekali tidak terdapat pada indikator RPJMD dan perlu untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi indikator RPJMD ke depan (*will be developed*).

1.5.4. Penyusunan indikator SDGs Provinsi Riau

Penyusunan indikator SDGs Riau merujuk pada indikator nasional dan menjadikan metadata indikator nasional sebagai referensi untuk menentukan indikator daerah. Adapun teknis penentuan indikator Provinsi Riau dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Identifikasi indikator nasional yang dis-agregasi datanya secara geografis/wilayah administrasi ada di tingkat provinsi.
- b. Meskipun tidak ditemukan disagregasi data pada tingkat provinsi, perlu ditelaah kembali pada konsep dan definisi operasionalnya. Jika konteksnya merupakan bagian dari agenda pembangunan daerah, maka indikator tersebut dipertimbangkan untuk diambil sebagai daftar usulan indikator daerah.
- c. Dari list dis-agregat data di tingkat provinsi dan kesesuaian konsep dan definisi operasionalnya dengan konteks daerah, lalu langkah selanjutnya yang diambil oleh

Provinsi Riau dalam menentukan indikator SDGs daerah dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria:

- 1) Lingkup administrasi data merupakan bagian dari wilayah provinsi;
- 2) Kesesuaian dengan kondisi/karakteristik daerah provinsi; dan
- 3) Kemungkinan penyediaan data indikator di tingkat provinsi.

Pembahasan penentuan indikator TPB/SDGs Provinsi Riau dilakukan melalui pertemuan kelompok kerja untuk masing-masing pilar sebagai berikut:

- a. Pilar Sosial. Dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan dengan waktu sebagai berikut: 22 Mei 2013, 13 Juni 2017, dan 18 Juli 2017.
- b. Pilar Ekonomi. Dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 22 Mei 2017 dan 06 Juni 2017.
- c. Pilar Lingkungan. Pertemuan dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 23 Mei 2017 dan 15 Juni 2017.
- d. Pilar Hukum dan Tata Kelola. Pertemuan dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 23 Mei 2017 dan 14 Juni 2017.

Berdasarkan metode penentuan di atas dan melalui proses pembahasan dengan kelompok kerja pada masing-masing pilar, disepakati terdapat 270 indikator untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pilar Sosial : 5 Tujuan, 35 Target, dan 117 Indikator;
- b. Pilar Ekonomi : 5 Tujuan, 23 Target, dan 54 Indikator;
- c. Pilar Lingkungan : 6 Tujuan, 28 Target dan 65 Indikator; dan
- d. Pilar Hukum dan Tata Kelola : 1 Tujuan, 8 Target dan 34 Indikator.

1.5.5. Penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs

Pertemuan kelompok kerja dilakukan untuk membahas isian matrik yang terdiri dari matrik 1 (target indikator TPB), matrik 2 (uraian program, kegiatan, indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah) dan matrik 3 (uraian program, kegiatan, indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh non-pemerintah).

Pertemuan kelompok kerja dilakukan melalui pertemuan untuk masing-masing kelompok kerja yang membahas isian matrik masing-masing pilar sebagai berikut:

- a. Pilar sosial : 21 November 2017
- b. Pilar ekonomi : 21 November 2017
- c. Pilar lingkungan : 22 November 2017
- d. Pilar hukum dan tata kelola : 23 November 2017.

1.5.6. Fasilitasi Penyusunan Matrik RAD SDGs Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa untuk pencapaian target SDGs daerah, Gubernur menyusun RAD bersama Walikota/Bupati di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak-pihak lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan RAD SDGs, Bappeda Provinsi Riau menyampaikan permintaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Riau untuk bersama-sama menyusun matrik rencana program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs di Provinsi Riau. Sebagai bagian dari membangun kesepahaman akan keterlibatan kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen RAD SDGs dan dalam rangka membangun pemahaman cara penyusunan matrik yang merupakan bagian dari dokumen RAD SDGs tersebut, Bappeda Riau menyelenggarakan pertemuan penyusunan matrik RAD SDGs Kabupaten/Kota.

Kegiatan workshop penyusunan matrik RAD SDGs dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2017 dan dihadiri oleh perwakilan Bappeda seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau serta seluruh anggota kelompok kerja SDGs Provinsi Riau. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kabupaten/kota tentang pengisian matriks RAD SDGs yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dokumen RAD SDGs Provinsi.

Adapun hasil dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman kabupaten/kota untuk pengisian matrik dan adanya kesepakatan kabupaten/kota untuk menyampaikan matrik isian yang telah diisi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota kepada Bappeda Provinsi Riau.

1.5.7. Konsultasi Publik Draft RAD SDGs Provinsi Riau

Guna memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan SDGs, draft yang dihasilkan oleh kelompok kerja disampaikan kepada publik melalui forum konsultasi publik yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2017.

Konsultasi publik dihadiri oleh 150 peserta dan dilakukan dengan dua metode: plenary dan pembahasan kelompok per-pilar. Pada sesi plenary menghadirkan 3 (tiga) narasumber yaitu dari Bappenas, Tenaga Ahli Penyusunan RAD SDGs, dan dari Tanoto Foundation.

1.5.8. Penyempurnaan Draft RAD SDGs Provinsi

Penyempurnaan draft RAD SDGs Provinsi Riau dilakukan melalui pertemuan intensif dengan tim Sekretariat SDGs Provinsi Riau, Tim Ahli dan Tim Koordinasi SDGs. Selain itu, draft RAD SDGs Provinsi Riau juga telah dikonsultasikan kepada Bappenas RI melalui Sekretariat SDGs Nasional.

1.6. Sistematika Rencana Aksi Daerah

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Riau terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan SDGs dengan misi RPJMD Provinsi Riau, bagaimana SDGs menyempurnakan MDGs dan juga komitmen Indonesia dalam melaksanakan SDGs. Bab satu ini menjabarkan pula platform partisipatif dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Riau sesuai dengan perannya masing-masing dan pembiayaan SDGs serta potensi pembiayaan lainnya. Proses penyusunan RAD juga menjadi satu bagian penting yang dibahas di bab pertama.

Bab kedua menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (baseline) dan capaian hingga tahun 2016 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2019.

Bab ketiga merupakan bab yang menunjukkan arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang terdapat pada RPJMD 2014-2019 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) OPD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program non-pemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAD ini.

Bab keempat menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, umpan balik dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs 2017-2019 ini. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan non-pemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak non-pemerintah dilakukan berdasarkan *self-assessment*. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Provinsi Riau.

Bab kelima merupakan penutup dari dokumen Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

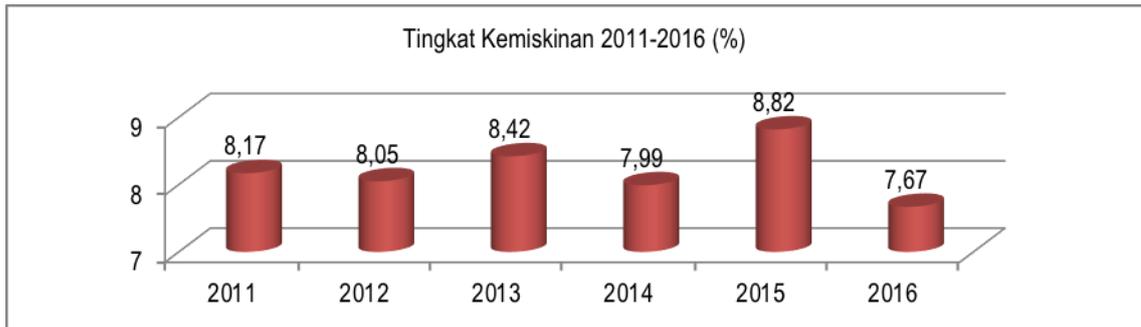
2.1. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

2.1.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

Dari aspek kemiskinan, kemajuan yang dicapai Provinsi Riau dalam penanggulangan kemiskinan selaras dengan capaian RPJMN pada tahun 2015 sebesar 8-10%. Namun terhadap target RPJMD Provinsi Riau sebesar 7,90% pada tahun 2014 dan 7,38% pada tahun 2015 belum tercapai. Belum terwujudnya target penurunan angka kemiskinan oleh pemerintah provinsi Riau sesuai target RPJMD, hal ini menunjukkan capaian perbaikan penanggulangan angka kemiskinan di provinsi Riau belum efektif karena belum terfokus dan lokus pada bidang-bidang determinan kemiskinan serta belum tepat sasaran walaupun secara umum terjadi kondisi yang semakin membaik.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Riau terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 tingkat kemiskinan sebesar 13,61% dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 8,17% pada tahun 2011. Sementara dalam enam tahun terakhir 2011-2016 kondisi kemiskinan di provinsi Riau mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2013 dan 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2011 (lihat Gambar 1.1). Peningkatan tingkat kemiskinan pada tahun-tahun tersebut disebabkan oleh kondisi perekonomian makro yang berpengaruh terhadap beban hidup penduduk miskin, sehingga penduduk pada posisi hampir miskin dapat jatuh menjadi miskin. Dengan kata lain, kondisi perekonomian makro seperti inflasi yang meningkat akibat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga berbagai kebutuhan makanan dan non makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat mengalami penurunan terutama pada komoditas pertanian yang berbasis ekspor. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 8,17% pada tahun 2011 menjadi 6,67% pada tahun 2016.

Gambar 1. Perkembangan Antara Waktu Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Riau Tahun 2011-2016



Posisi relatif tingkat kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2015 sebanyak 8,82% (Gambar 1.1) terhadap total kemiskinan di Indonesia dan berada pada posisi 22 dari persentase penduduk miskin terbesar diantara 33 provinsi di Indonesia. Proporsi penduduk miskin di perdesaan lebih banyak yaitu 8,92% dan perkotaan sebanyak 6,90%. Jika diperhatikan bahwa tingkat beban hidup di Provinsi Riau menempati posisi ke-enam di Indonesia dengan Garis Kemiskinan Rp. 364.176 per kapita per bulan atau kebutuhan minimum bagi seorang industri untuk melangsungkan kehidupannya. Oleh karena upaya penurunan angka kemiskinan terus harus dilakukan melalui program dan kegiatan dengan melakukan perbaikan terhadap komponen yang menjadi determinan kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan ketahanan pangan.

2.1.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

2.1.2.1. Menghilangkan Kelaparan

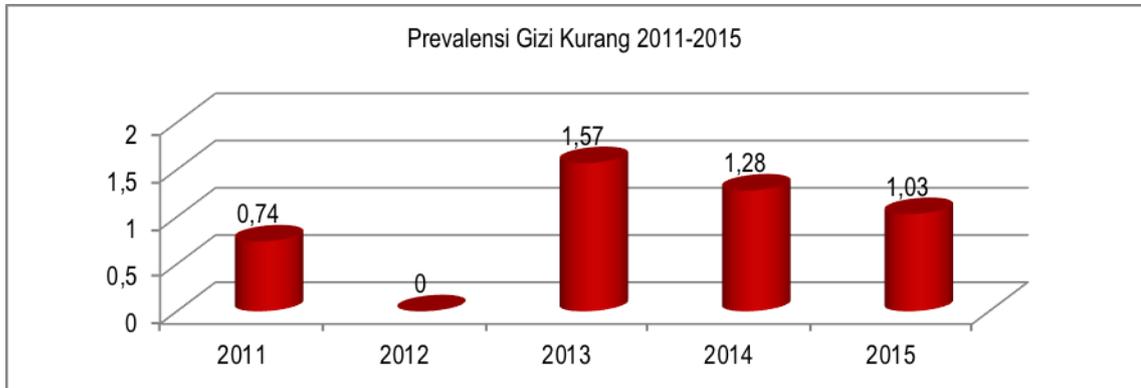
Dari aspek penanganan untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator terkait langsung dengan tujuan SDGs tersebut yaitu status gizi yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Dalam laporan ini hanya mengemukakan status gizi balita yang dapat diukur berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

2.1.2.2. Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi

Berat badan yang rendah dapat disebabkan karena tubuh yang pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut). Oleh karena keseimbangan antara berat badan dengan tinggi badan sangat dipengaruhi oleh konsumsi gizi yang seimbang. Prevalensi gizi kurang pada periode 2011-2015 menunjukkan trend fluktuatif, dimana

pada tahun 2011 prevalensi gizi kurang sebesar 0.74% meningkat menjadi 1.03% pada tahun 2013, namun sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 terjadi trend penurunan sebesar 18,47% per tahun seperti pada gambar berikut.

Gambar 2. Perkembangan Antara Waktu Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Riau Tahun 2011-2016



Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2016 *) Tahun 2012 : Tidak Dilakukan PSG.

Oleh karena itu program dan kegiatan bidang pangan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Faktor makanan dan penyakit infeksi, sebagai penyebab langsung masalah gizi, keduanya saling berkaitan. Anak balita yang tidak mendapat cukup makanan bergizi seimbang memiliki daya tahan yang rendah terhadap penyakit sehingga mudah terserang infeksi. Sebaliknya penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dapat mengakibatkan asupan gizi tidak dapat diserap tubuh dengan baik sehingga berakibat gizi buruk. Oleh karena itu, mencegah terjadinya infeksi juga dapat mengurangi kejadian gizi kurang dan gizi buruk. BBLR akibat kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil, dapat meningkatkan angka kematian bayi dan anak balita. Anemia kurang zat besi pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko kematian waktu melahirkan dan melahirkan bayi yang juga menderita anemia. Kurang vitamin A (KVA) pada bayi dan anak balita dapat menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan resiko kebutaan, dan meningkatkan resiko kesakitan dan kematian akibat infeksi (Tarwotjo, et al 1989).

2.1.2.3. Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan

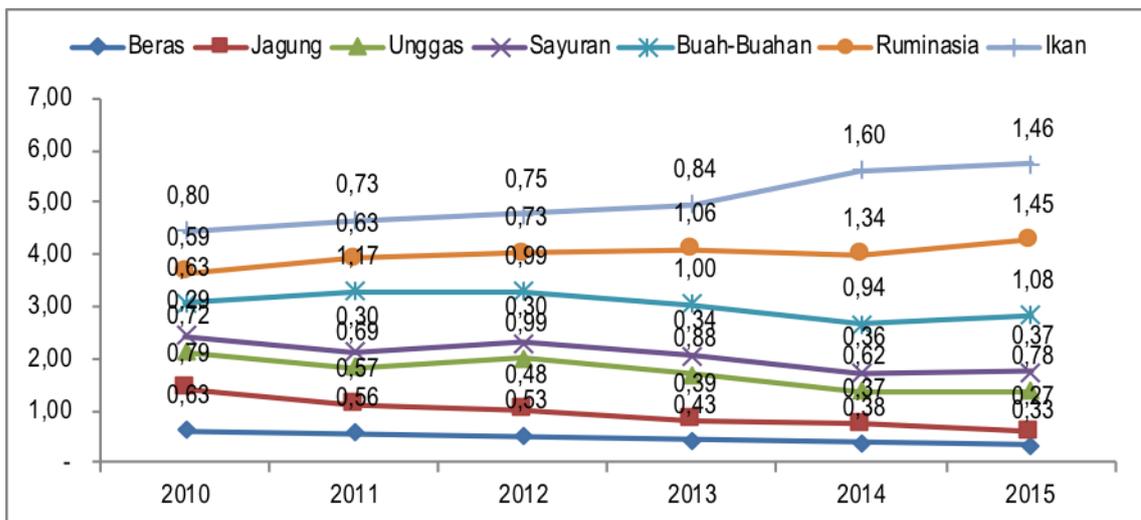
Untuk mencapai ketahanan pangan maka terdapat empat dimensi yang harus di perhatikan antara lain:

- a. Dimensi pertama yaitu ketersediaan pangan secara fisik dari sisi penyediaan dengan meningkatkan jumlah produksi, tingkat ketersediaan stok dan perdagangan bersih (*net trade*).

- b. Dimensi kedua akses pangan secara fisik dan ekonomi diperlukan kebijakan yang fokus peningkatan pendapatan, pengurangan belanja keluarga miskin, ketersediaan fasilitas pasar yang memadai dan harga yang terjangkau.
- c. Dimensi ketiga dengan memperhatikan penggunaan pangan artinya pangan yang dikonsumsi harus memberikan energi yang mencukupi (kkal/kapita/hari) dan protein (gram/kapita/hari) yang lengkap serta adanya variasi konsumsi pangan.
- d. Dimensi keempat perlunya stabilitas yang mempengaruhi ketiga dimensi tersebut di atas. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan rasio antara produksi pangan dan konsumsi pangan baik beras, jagung, sayur, buah-buahan, ruminansia, unggas dan ikan. Berikut Gambar 1.3 disajikan rasio produksi dan konsumsi produk pangan.

Upaya peningkatan produksi pangan harus didukung oleh adanya kebijakan peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan melalui peningkatan produktifitas secara maksimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi & biosfer dan keberlanjutan masyarakat. Keberlanjutan ekologi & biosfer meliputi keberlanjutan sumberdaya dan lingkungan sementara keberlanjutan masyarakat meliputi keberlanjutan cultural, keberlanjutan social, dan keberlanjutan politis serta keberlanjutan institusi. Oleh karena itu program dan kegiatan pembangunan bidang penanganan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan harus tepat tujuan, sasaran dan strategi.

Gambar 3. Perkembangan Rasio Produksi dan Konsumsi Beras, Jagung, Sayuran dan Buah-Buahan, Ruminansia, Unggas dan Ikan Provinsi Riau, 2010-2015



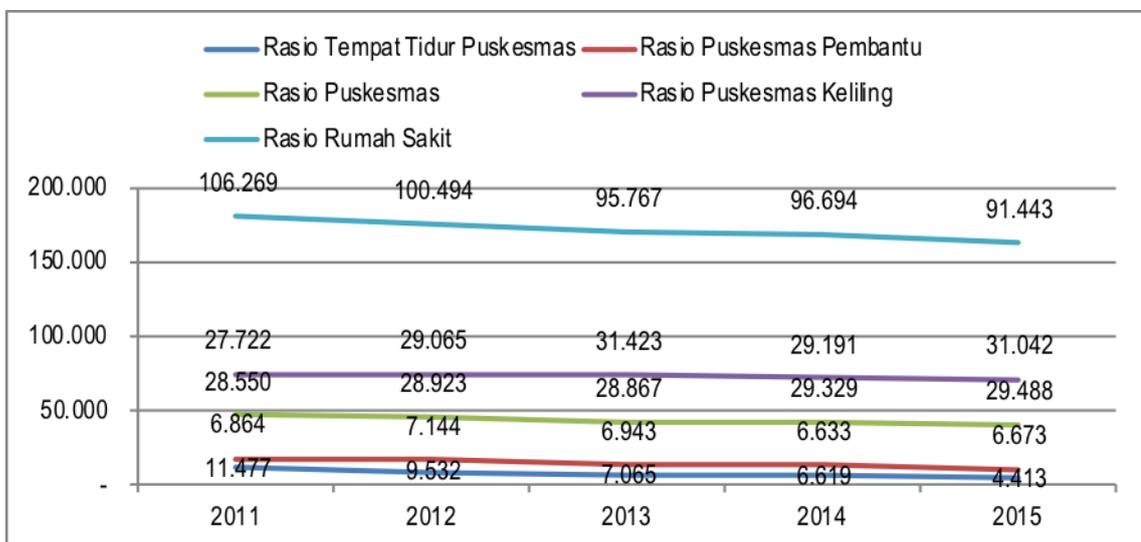
2.1.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Terkait dengan kesehatan, maka pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sejalan dengan upaya pemerintah

melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, teknologi, perbaikan pengelolaan kelembagaan kesehatan dan kebijakan, sehingga terjadinya perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara umum program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di provinsi Riau mengalami perbaikan, walaupun beberapa diantaranya masih harus mendapatkan prioritas terutama terkait dengan rasio pertumbuhan yang semakin meningkat.

Rasio pelayanan kesehatan menunjukkan terjadinya perbaikan dari tahun 2011-2015. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio yang semakin menurun artinya beban terhadap sarana dan prasarana serta tenaga medis kesehatan semakin menurun seiring dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana serta tenaga medis pada bidang kesehatan. Berikut disajikan pada Gambar 1.4 tentang rasio pelayanan kesehatan dari aspek rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling di Provinsi Riau tahun 2011-2015.

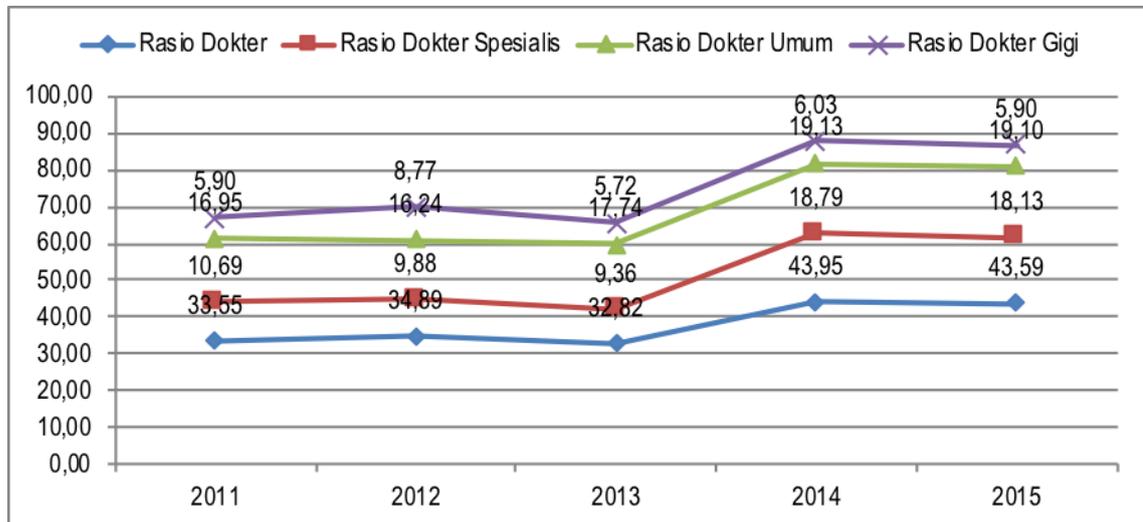
Gambar 4. Rasio Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2011– 2015



Beberapa pelayanan kesehatan dasar yang sudah diselenggarakan adalah penyediaan sarana dan prasarana posyandu, dokter, tenaga medis. Analisis terhadap perkembangan capaian suatu indikator adalah penting untuk melihat pola pencapaian target pembangunan menurut indikator tersebut. Perkembangan itu dapat diketahui dengan mengamati perubahan antar-waktu dari capaian indikator bidang kesehatan. Capaian indikator bidang kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa sarana dan prasarana serta tenaga medis kesehatan. Upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga medis kesehatan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sehingga resiko kesehatan dapat dikurangi seperti angka kematian ibu melahirkan. Penurunan kematian ibu yang dihubungkan dengan peningkatan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Selain itu, diperlukan penjaminan kompetensi tenaga kesehatan melalui berbagai upaya yang meliputi pendidikan *pre-service*, *in-service training*, penerapan kewenangan tenaga kerja yang

sesuai, sertifikasi tenaga dan fasilitas kesehatan, pemberian izin praktek tenaga kesehatan dan upaya audit pelayanan terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Berikut disajikan perkembangan rasio tenaga medis di provinsi Riau 2011-2015. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan beban kerja tenaga medis dalam pelayanan kesehatan semakin bertambah dari tahun 2011-2015. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio yang semakin meningkat.

Gambar 5. Rasio Dokter Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015



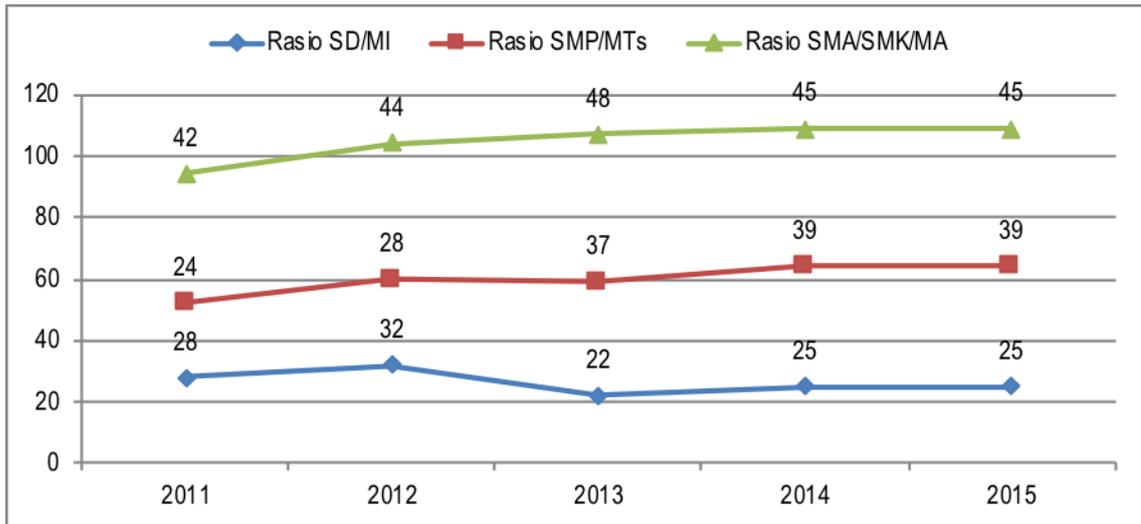
2.1.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua

Pembangunan pendidikan di Pprovinsi Riau telah menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dengan rata-rata lama sekolah 8,59 tahun pada tahun 2016. Kemajuan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur sekolah (sarana dan prasarana) dan bantuan soft skill lainnya serta program Wajib Belajar 9 tahun yang diakui cukup sukses.

Menurut UU 23 tahun 2014, kewenangan provinsi dalam menangani bidang pendidikan yaitu hanya pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK dan MA) serta pendidikan khusus dan layanan khusus. Dengan kewenangan ini diharapkan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah akan lebih baik.

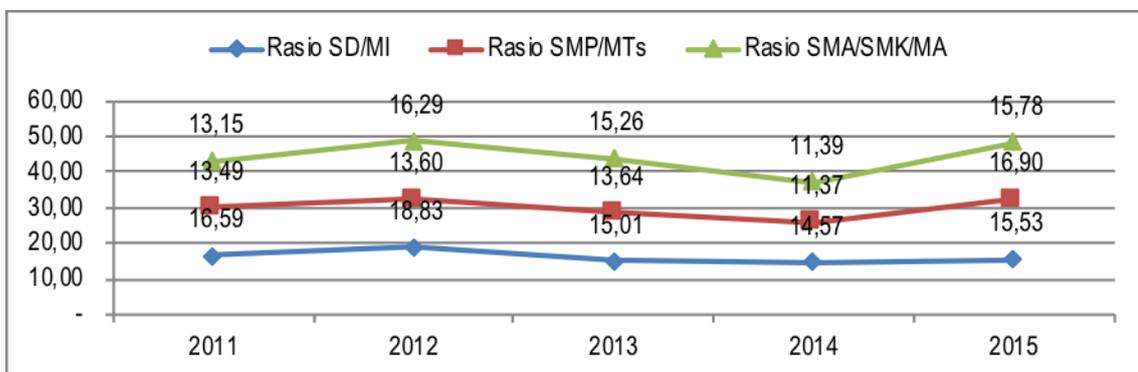
Berikut disajikan rasio murid/siswa terhadap ketersediaan ruang kelas dari tahun 2011-2015.

Gambar 6. Rasio Murid/Siswa Terhadap Ketersediaan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015



Rasio ruang kelas baik SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK dan MA seluruhnya mengalami peningkatan. Artinya terjadi peningkatan beban kelas setiap tahun masing-masing dengan pertumbuhan 1,41%, 14,26% dan 1,57%. Oleh karena itu program peningkatan sarana dan prasarana sekolah dengan kegiatan penambahan jumlah sekolah dan ruang kelas baru perlu mendapatkan prioritas untuk jenjang pendidikan dasar oleh pemerintah kabupaten/kota dan pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi Riau.

Gambar 7. Rasio Murid/Siswa Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2011-2015



Dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendidikan tingkat menengah diharapkan masalah-masalah yang dihadapi dalam penanganan pendidikan menengah atas terkait dengan kekurangan ruang kelas secara umum, ketimpangan kekurangan ruang kelas antara kabupaten kota akan dapat teratasi dalam beberapa tahun kedepan pada periode 2017-2019. Berikut disajikan rasio murid/siswa terhadap guru dari tahun 2011-2015.

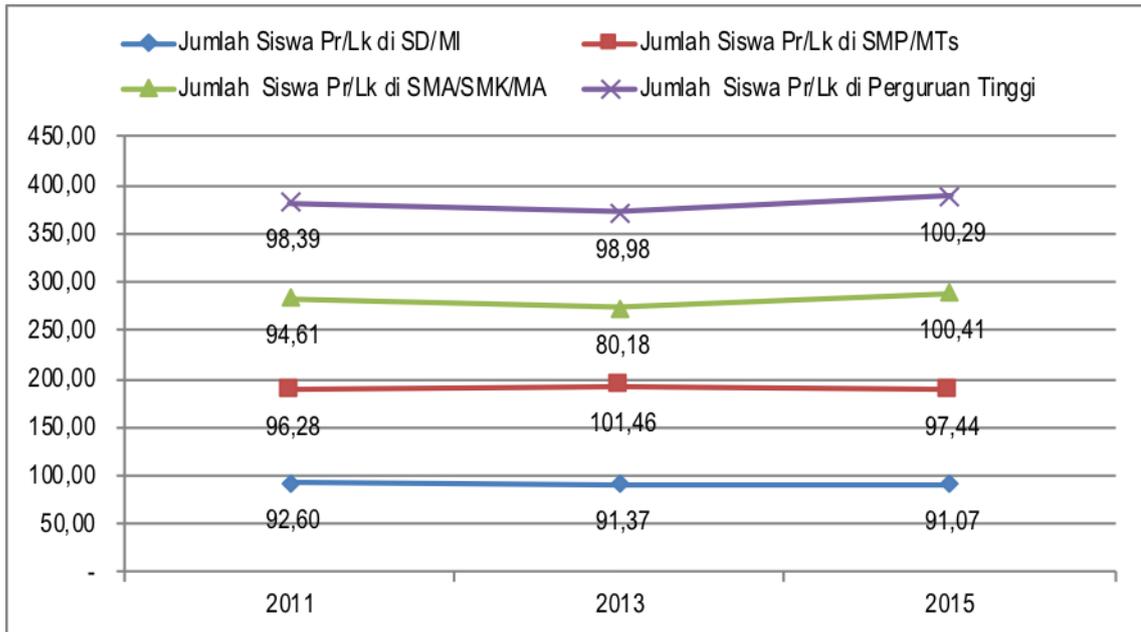
Jumlah siswa dan guru yang terdata di Dinas Pendidikan Provinsi Riau menunjukkan trend peningkatan jumlah, namun peningkatan jumlah guru belum seimbang dengan trend peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio jumlah guru terhadap murid/siswa yang semakin bertambah dari tahun 2014-2015, padahal tahun 2012 ke 2014 terjadi perbaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu diperlukan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan rasio murid terhadap ruang kelas dan guru dalam rangka menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

2.1.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Kesetaraan gender ditekankan dalam Rencana Pembangunan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan yang berkelanjutan. Walaupun banyak kemajuan yang dicapai, namun kesenjangan gender masih ada. Secara keseluruhan, tingkat kesetaraan gender di Provinsi Riau sudah berkategori baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio APM perempuan terhadap laki-laki di semua tingkatan pada tahun 2010-2014 sudah di atas 100.

Jika dibandingkan jumlah siswa antara perempuan dan laki-laki pada jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan bahwa dari tahun 2011/2012 ke 2015/2016 mengalami penurunan dari 92,60% menjadi 91,07% atau turun 0,83% per tahun. Sementara tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan sebesar 0,71% per tahun yaitu dari 96,28% pada tahun 2011/2012 menjadi 97,44% pada tahun 2015/2016 bahkan pada tahun 2013/2014 jumlah siswa perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki mencapai 101,46:100. Demikian halnya dengan tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa pada tahun 2015/2016 jumlah siswa perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki masing-masing 100,41:100 dan 100,29:100 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat Gambar 8 di bawah ini. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat kesetaraan gender pada lembaga pendidikan semakin baik. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran kaum perempuan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia terkait pendidikan semakin tinggi semakin baik.

Gambar 8. Rasio Murid/Siswa Perempuan Terhadap Laki-Laki Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2011-2015



Namun demikian upaya peningkatan rasio kesetaraan gender pada pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama harus terus dilakukan dengan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun terutama di wilayah kabupaten kota yang kondisi rasio kesetaraan gendernya yang masih rendah dengan melihat kondisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sosialisasi pada masyarakat untuk menyekolahkan putrinya pada jenjang pendidikan tersebut.

Sementara itu kesetaraan gender pada pegawai menunjukkan bahwa jumlah pegawai menurut jenis kelamin per kabupaten/kota, dimana hanya Kota Pekanbaru yang jumlah pegawai laki-laknya yang lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan. Sedangkan di kabupaten Kota lainnya lebih banyak pegawai perempuan dibandingkan pegawai laki-laki seperti Bengkalis 1:1,5 artinya terdapat 10 pegawai laki-laki dengan 15 pegawai perempuan. Oleh karena tingkat kesetaraan gender bidang pemerintahan menunjukkan bahwa peran kaum perempuan lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki di setiap kabupaten/kota, kecuali Kota Pekanbaru dan provinsi Riau. Namun demikian perlu perbaikan dari aspek managerial kepegawaian agar kinerja pemerintah dapat ditingkatkan.

2.1.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pada tahun 2017; 40% masyarakat sudah mempunyai akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas, telah melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas prasarana Lingkungan Permukiman Perkotaan Provinsi Riau, pembangunan SPAM IKK 2.400 M dan SPAM regional, penyediaan air minum kawasan wisata pada 2 lokasi, penyediaan air minum pendukung kesehatan PDAM, dan Pengelolaan UPT Air Minum Pekanbaru.

Selanjutnya dalam rangka Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, telah dilakukan penguatan kelompok kerja Monev Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Provinsi Riau di 11 kabupaten/kota, koordinasi dengan kabupaten/kota untuk pengendalian pencemaran limbah padat dan domestik, dan koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih dengan 30 industri, serta dilakukan pemantauan kualitas lingkungan di 2 (dua) sungai.

Air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2015 jumlah Perusahaan Air Minum menjadi 27 perusahaan dengan kapasitas potensial air minum 2.466 liter per detik. Produksi air bersih yang di salurkan pada tahun 2015 sebesar 19,86 juta m³, sejumlah 13,37 juta m³ (67,32 persen) di distribusikan ke kelompok Non Niaga yaitu rumah tangga dan instansi pemerintah, sejumlah 1,61 juta m³ (8,12 persen) ke kelompok Niaga, 0,35 juta m³ (1,78 persen) ke kelompok sosial, 0,01 juta m³ (0,05 persen) ke kelompok industri dan 0,08 juta m³ (0,38 persen) kekelompok khusus (BPS, 2017). Perkembangan jumlah perusahaan dan kapasitas produksi perusahaan air bersih; produksi perusahaan air bersih menurut sumber air; dan jumlah pelanggan, volume dan nilai air bersih yang disalurkan menurut jenis pelanggan di Provinsi Riau disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Kapasitas Produksi Perusahaan Air Bersih Di Provinsi Riau

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perusahaan	Unit	24	25	24	25	27
2.	Kapasitas Produksi:						
a.	Kapasitas Potensial	Liter/detik	1.672	1.739	2.096	2.349	2.466
b.	Kapasitas Efektif	Liter/detik	1.424	1.337	1.593	1.888	2.033
c.	Efektivitas	%	85	77	76	80	82

Sumber: BPS (2017)

Tabel 2. Produksi Perusahaan Air Bersih menurut Sumber Air yang Digunakan di Provinsi Riau tahun 2011 – 2015 (m³)

No.	Sumber Air	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sungai	18.379.597	18.381.882	18.493.991	19.097.691	21.135.293
2.	Waduk	397.333	399.764	399.958	388.771	358.028
3.	Mata Air	297.658	298.027	299.958	242.559	74.592
4.	Lainnya	989.700	990.986	993.247	1.171.085	1.380.765
	Jumlah	20.064.288	20.070.659	20.187.154	20.900.106	22.948.678

Sumber: BPS (2017)

Tabel 3. Jumlah Pelanggan, Volume dan Nilai Air Bersih yang Disalurkan menurut Jenis Pelanggan di Provinsi Riau, 2015

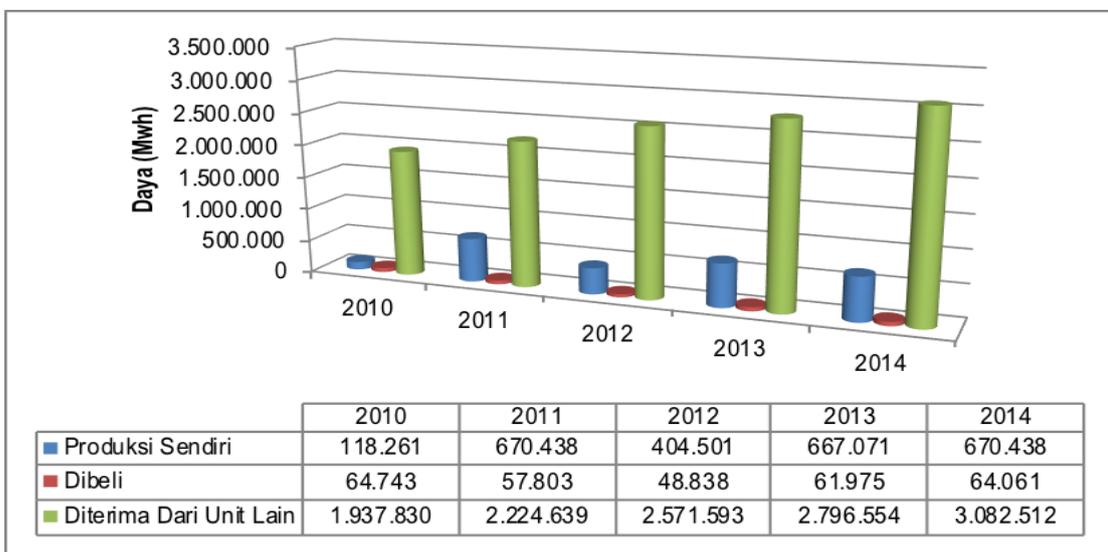
No.	Pelanggan	Jumlah	Air bersih yang disalurkan	
			Volume (ribu m ³)	Nilai (juta rupiah)
1.	Kelompok Sosial	873	353	871
2.	Non Niaga	66.621	13.371	53.379
3.	Niaga	7.522	613	11.909
4.	Industri	13	10	97
5.	Kelompok Khusus	20	76	274
6.	Susut/Hilang		4.439	
	Jumlah tahun 2015	75.049	19.863	66.530
	2014	73.085	14.869	60.263
	2013	66.002	15.757	58.171
	2012	64.108	14.484	47.196
	2012	64.610	12.388	51.799

Sumber: BPS (2017)

2.1.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua

Selama periode 2010 – 2014, penyediaan listrik oleh PT. PLN di Provinsi Riau terus meningkat dan dilakukan dengan 3 cara yaitu produksi sendiri, beli dan diterima dari unit lain. Sumber listrik terbesar dengan jumlah yang terus meningkat diterima dari unit lain. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan suplai energi listrik melalui sistem interkoneksi meningkat sebesar 12,47% per tahun.

Gambar 9. Jumlah Energi Listrik Yang Diproduksi, Dibeli dan Diterima Dari Unit Lain di Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014



Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2011 – 2015)

Secara keseluruhan, selama periode 2010 – 2014 jumlah energi listrik yang tersedia di Provinsi Riau terus meningkat namun masih jauh dari kebutuhan. Pada tahun 2010, persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan listrik PLN hanya sebesar 56,18%, meningkat menjadi 74,48% pada tahun 2014.

Upaya mencukupi suplai dan menjamin tegangan yang dapat diandalkan di era global yang akan datang, maka perlu diupayakan peningkatan daya listrik melalui penambahan dan diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru. Diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru, untuk wilayah Riau dimungkinkan melalui pembangunan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), dan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). Pembangunan PLTG bisa dilaksanakan sehubungan dengan dibangunnya Jaringan Transmisi Gas Bumi “Trans Sumatera Tengah” (Asamera Corridor Block - Duri - Batam) oleh PT Gas Negara, sedangkan PLTU dengan dibangunnya PLTU Peranap oleh PT Bukit Asam menggunakan bahan bakar batu bara. Untuk PLTU Peranap ini pembangunannya direncanakan dalam dua tahap, masing-masing dengan kapasitas 2 X 600 MW.

Kebijakan pemerintah di bidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi khususnya sektor industri. Untuk mencapai sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik serta perluasan jaringan distribusi agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dengan pelayanan yang baik. Komitmen pemerintahan pusat terhadap energi berkelanjutan di Provinsi Riau salah satunya adalah rencana pembangunan PLTMH Lompatan Harimau (terdapat di buku RPJMN).

Kapasitas terpasang pembangkit listrik wilayah Riau tahun 2016 sebesar 28.749 MW dan tenaga yang dibangkitkan sebesar 4.426.439.044 KWH. Jumlah pelanggan PLN tahun 2016 sebanyak 1.337.772 sebesar 89, 83 persen merupakan pelanggan rumah tangga (BPS, 2017).

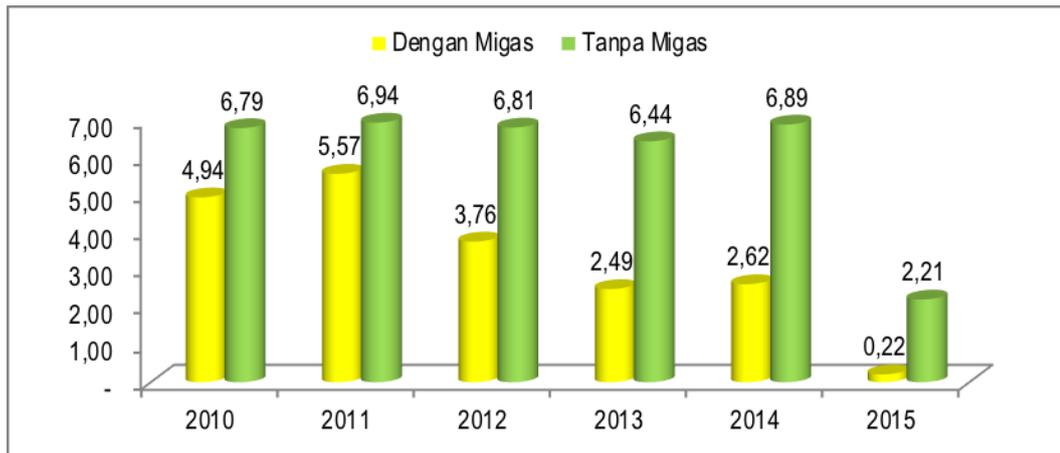
2.1.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

2.1.8.1. Perkembangan Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada kurun waktu 2010-2015 mengalami trend penurunan. Penurunan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2015 dari 2,82% menjadi 0,22% dengan migas dan dari 6,89% menjadi 2,21% tanpa migas. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya harga minyak dunia yang berimplikasi pada penurunan dana bagi hasil. Selain itu, juga disebabkan oleh menurunnya harga beberapa komoditi perkebunan unggulan Provinsi Riau seperti kelapa sawit, kelapa dan karet.

Rendahnya harga komoditas tersebut berakibat pada rendahnya gairah masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa dan berakibat pada rendahnya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dan pemerintah.

Gambar 10. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2010-2015

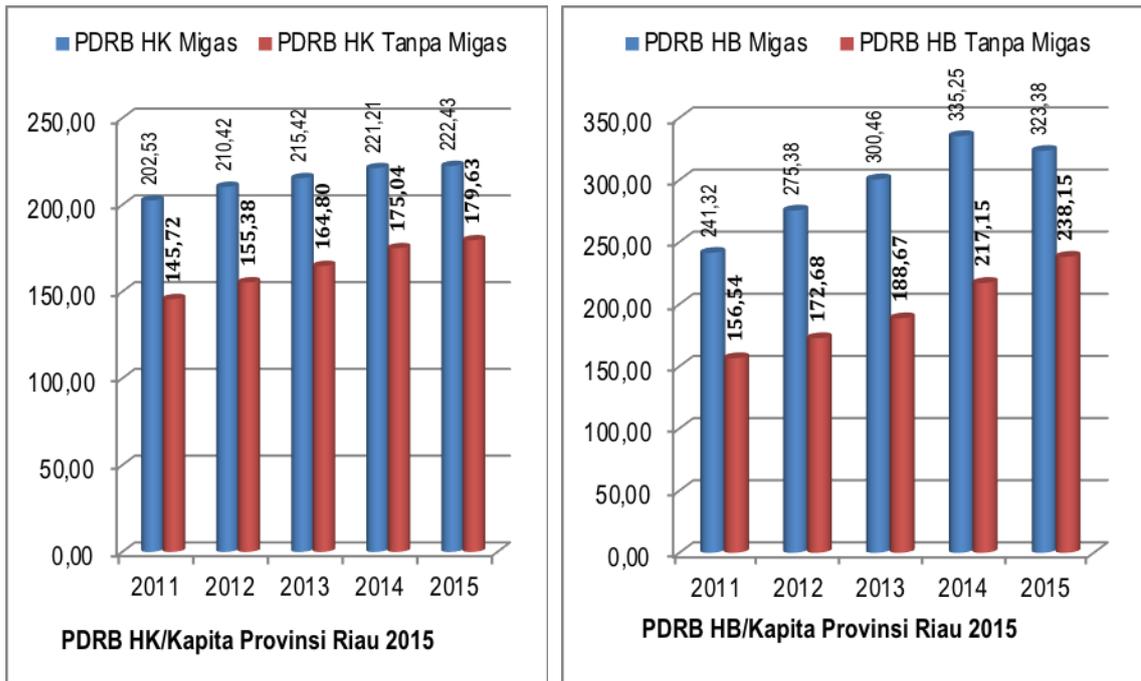


Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2015) dan BRS, 2016

Perkembangan PDRB per kapita Provinsi Riau selama periode 2011 – 2015 menunjukkan trend meningkat dari Rp. 241,32 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 323,38 juta tahun 2015. Sementara dengan harga konstans (HK) dengan migas meningkat dari Rp. 202,53 juta menjadi Rp. 222,43 juta pada tahun 2015.

Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita HB dengan migas naik 5,23% per tahun dan tanpa migas naik 14,62% per tahun. Sementara HK dengan migas turun 0,30% per tahun dan HK tanpa migas naik 2,86% pertahun. Peningkatan rata-rata pertumbuhan HB dengan migas lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan HK dengan migas dengan selisih peningkatan 5,53%. Demikian halnya dengan peningkatan rata-rata pertumbuhan HB tanpa migas lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan HK tanpa migas (TM) dengan selisih peningkatan 11,76%. Hal ini memberikan gambaran bahwa tingkat kenaikan harga pada komoditas non migas mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan komoditas dengan migas. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa kesejahteraan dan daya beli masyarakat Provinsi Riau cenderung semakin baik.

Gambar 11. PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2011-2015



Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2016)

2.1.8.2. Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau selama kurun waktu 2011-2015 mengalami peningkatan dari 2.560.402 orang pada tahun 2011 menjadi 2.762.170 orang pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2011 yang berjumlah 3.857.145 orang, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau pada tahun tersebut sebesar 66,38% dan kemudian menurun menjadi 63,22% pada tahun 2015 dengan rata-rata penurunan sebesar -1,18%. Data tentang ketenagakerjaan ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Sementara itu pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja mengalami peningkatan sebesar 15,99% per tahun. Artinya bahwa penyerapan angkatan kerja tidak mengalami perbaikan dengan penambahan penduduk yang bekerja walaupun jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 2,02% per tahun. Tetapi peningkatan tersebut lebih rendah dari pertumbuhan jumlah angkatan kerja per tahun.

Tabel 4. Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk Usia 15 ke atas	3.857.145	3.985.257	4.135.186	4.257.120	4.390.690
Bekerja	2.424.180	2.399.002	2.479.493	2.518.485	2.623.818
TPAK (%)	66,38	62,91	63,44	63,31	63,22
PDRB ADHK per tenaga kerja dengan Migas (ribu rupiah)	169.218	177.418	175.918	177.866	171.101
PDRB ADHK per tenaga kerja tanpa Migas (ribu rupiah)	122.169	131.130	133.813	139.534	136.629

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2016)

Untuk mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, dilakukan melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. Indikator ini belum tercapai karena tingkat kesiapan tenaga kerja tersebut masih rendah. Tahun 2011 PDRB per tenaga kerja ADHK termasuk migas sebesar Rp. 169,22 juta meningkat menjadi Rp. Rp. 171,10 juta. Jika dilihat dari PDRB per kapita ADHK tanpa migas, terjadi kenaikan yang pesat pada periode yang sama dari Rp. 122,17 juta menjadi Rp. 136,63 juta.

2.1.8.3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Selama kurun waktu 2011-2015, jumlah koperasi di Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 3,47%. Namun demikian, jumlah anggota koperasi mengalami penurunan dari 610.749 orang pada tahun 2011 menjadi 541.731 orang pada tahun 2015 atau turun sebanyak 2,73%. Hal ini disebabkan oleh jumlah koperasi aktif yang hanya berjumlah 3.099 unit dari 5.271 unit koperasi atau sebesar 58,79%.

Tabel 5. Perkembangan Koperasi Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

No	Investasi	Perkembangan					Pert. (%/Thn)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah koperasi	4.792	5.013	6.125	4.993	5.271	3,47
	Koperasi Aktif	-	-	-	-	3.099	
	Anggota	610.749	608.468	629.567	545.025	541.731	(2,73)
	Modal Sendiri (Rp. Juta)	641.052	726.108	842.723	1.152.374	1.103.553	15,46
	Modal Luar (Rp. Juta)	1.609.952	1.715.236	1.636.660	1.905.988	2.389.091	10,94
	Volume Usaha (Rp. Juta)	2.279.604	2.348.918	2.379.019	3.314.885	2.960.121	8,24
	SHU (Rp. Juta)	106.564	129.150	138.253	182.829	173.534	13,85
2	Jumlah UMKM	484.289	490.396	-	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

2.1.8.4. Peningkatan Pariwisata

Jumlah tamu asing atau wisman yang berkunjung ke Provinsi Riau pada periode tahun 2011-2015 sebanyak 54.437 orang atau meningkat rata-rata sebesar 4,70% per tahun. Tamu asing tersebut datang ke Provinsi Riau melalui pintu masuk utama kota Pekanbaru 51,09% atau 27.810 orang, diikuti oleh kota Dumai 24,04% atau 13.100 orang,

kota Bengkalis 13,41%. Dalam kurun waktu lima tahun jumlah tamu asing yang datang ke Provinsi Riau melalui pintu masuk utama cenderung meningkat meskipun pernah mengalami penurunan pada tahun 2013.

Tamu asing tersebut datang ke provinsi Riau melalui pintu masuk utama kota Pekanbaru 51,09% atau sebanyak 27.810 orang. Sebagian besar tamu asing, yakni 80,94% berasal dari negara-negara ASEAN dan 19,06% berasal dari negara lain. Sementara itu dari empat pintu wisatawan dimana distribusi pintu masuk wisatan asing paling sedikit melalui Selat Panjang hanya sebanyak 6.226 orang atau 11,44%.

Jika dihitung jumlah wisatawan asing yang masuk ke Provinsi Riau setiap tahun menurut bulan, maka kedatangan tamu asing tertinggi terjadi pada bulan Juli sebanyak 6.247 orang atau 5,20%. Kondisi ini dapat dimaklumi bahwa pada bulan tersebut merupakan bulan liburan sekolah secara umum. Oleh karena itu perlu upayaantisipasi dalam pelayanan tamu terutama di pintu-pintu masuk tamu asing tersebut.

2.1.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Kondisi objektif infrastruktur sektor perhubungan di Provinsi Riau hingga saat ini masih terbatas dan belum memenuhi standar keselamatan, baik pada moda angkutan jalan, angkutan laut dan angkutan udara. Keterbatasan berbagai sarana dan prasarana transportasi tersebut berdampak intensitas tingkat pelayanan yang rendah.

Terkait dengan angkutan udara, Provinsi Riau memiliki 6 pelabuhan udara. Lima pelabuhan udara dimiliki oleh Pemerintah dan satu pelabuhan udara dimiliki oleh swasta. Pelabuhan udara yang dimiliki oleh pemerintah tersebut yaitu Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Pinang Kampai di Dumai, Japura di Indragiri Hulu, Tempuling di Indragiri Hilir, Pasir Pengaraian di Rokan Hulu. Sedangkan satu pelabuhan udara yang dimiliki swasta adalah Sultan Syarif Harun Setia Negara di Pelalawan.

Provinsi Riau memiliki 33 pelabuhan umum, 11 Pelabuhan Terminal Khusus, 96 Pelabuhan TUKS, 1 Pelabuhan Utama, 13 Pelabuhan Pengumpul, 19 Pelabuhan Pengumpan, 9 Pelabuhan yang diusahakan dan 24 pelabuhan yang tidak diusahakan.

Tabel 6. Jumlah Pelabuhan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015

No	Kabupaten/ Kota	Jenis				Status			
		Umum	Tersus	TUKS	Utama	Pengumpul	Pengapan	Diusahakan	Belum diusahakan
1	Kuansing	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indragiri Hulu	1	-	4	-	1	-	1	-
3	Indragiri Hilir	12	3	15	-	4	8	2	10
4	Pelalawan	1	-	-	-	1	-	-	1
5	Siak	5	-	15	-	2	3	-	5
6	Kampar	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bengkalis	6	7	7	-	2	4	2	4
9	Rokan Hilir	3	-	2	-	1	2	1	2
10	Kep.Meranti	3	-	8	-	1	2	1	2
11	Pekanbaru	1	-	15	-	1	-	1	-
12	Dumai	1	1	30	1	-	-	1	-
Jumlah		33	11	96	1	13	19	9	24

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Pada tahun 2015 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi dalam perekonomian (PDRB) provinsi Riau pada harga berlaku dengan migas sebesar 23,87% dan harga konstan dengan migas sebanyak 28,26%, menempati urutan kedua pada harga berlaku dan urutan pertama pada harga konstan dari 17 sektor lapangan usaha dalam perekonomian.

Selama periode 2011-2015 sektor industri pengolahan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3.25% pertahun dan nasional sebesar 4,48% dengan kontribusi dalam perekonomian (PDRB) provinsi Riau dengan rata-rata sebanyak 28,26% pada tahun 2015 menempati urutan pertama setelah industri pertambangan dan sektor pertanian. Walaupun menempati urutan pertama pada tahun 2015 tetapi hal ini belum dapat melampaui kontribusi nasional yang berada di atas 30%. Masih rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur perekonomian di provinsi Riau tidak terlepas dari kurangnya jenis industri yang berkembang di provinsi Riau.

Pada tahun 2013, dari 359 (KBLI 5 Digit) jenis industri yang berkembang di Indonesia dimana hanya terdapat 32 jenis industri yang berkembang di Riau dan 29 jenis industri diantaranya merupakan industri berbasis industri agro. Jumlah unit usaha pada industri sedang dan besar sebesar 191 unit pada tahun 2009 dan kemudian meningkat menjadi 217 unit usaha pada tahun 2013 atau naik sebesar 13,61% selama periode 2009-2013. Sedangkan jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dari 48.202 orang pada tahun 2009 menjadi 64.002 orang pada tahun 2013 atau naik sebesar 32,78%.

Sementara itu nilai output rata-rata tenaga kerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 60.488.084.355 pada tahun 2009 menjadi Rp. 223.553.742.033

pada tahun 2013. Persentase peningkatan nilai output per tenaga kerja sebesar 178,35% atau naik dari Rp.1.254.887 pada tahun 2009 menjadi Rp. 3.492,918 pada tahun 2013. Sedangkan persentase peningkatan nilai tambah per tenaga kerja naik 23,74% atau bertambah dari Rp. 704.598 pada tahun 2009 menjadi Rp. 871.836 pada tahun 2013. Perkembangan Sektor Industri Provinsi Riau Tahun 2009-2013 lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Perkembangan Sektor Industri Provinsi Riau Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Unit Usaha	191	183	205	202	217
Tenaga Kerja (Org)	48,202	51,015	72,903	59,470	64,002
Nilai Output (Rp)	60.488.084.355	99.115.947.081	154.563.118.879	172.022.759.137	223.553.742.033
Nilai Tambah (Rp)	33.963.066.298	34.765.145.740	51.517.303.820	45.848.556.289	55.799.271.875
NO/Tenaga Kerja	1.254.887	1.942.879	2.120.120	2.892.597	3.492.918
NT/Tenaga Kerja	704.598	681.469	706.655	770.952	871.836

Sumber: Data Olahan, 2015

Jenis industri yang mendominasi kelompok industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani dengan kode 104 adalah pabrik kelapa sawit (PKS). Jumlah PKS yang berskala industri besar dan sedang di Riau pada tahun 2010 adalah sebanyak 118 perusahaan atau mencapai 64,48% terhadap total perusahaan industri berskala besar dan sedang di Riau, bahkan pada tahun 2014 jumlah PKS sudah mencapai 220 perusahaan.

Kepemilikan dan penguasaan peralatan komunikasi dan informatika merupakan salah satu indikator kemajuan masyarakat suatu daerah. Selama periode 2010-2014, persentase rumah tangga yang memiliki telepon mengalami penurunan sebesar 11,20% per tahun, HP tumbuh sebesar 2,48% per tahun, komputer desktop menurun 8,15% per tahun dan Laptop tumbuh sebesar 12,70% per tahun. Total rumah tangga yang memiliki sarana telekomunikasi pada tahun 2014 sebesar 98,87%. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon, HP, desktop dan Laptop menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Riau ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Persentase Rumah Tangga Pengguna Jasa Komunikasi di Provinsi Riau Tahun 2010-2014

No	Indikator	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Telepon	6,04	5,40	3,72	3,51	3,60	-11,20
2	Telepon Selular (HP)	86,43	91,40	93,09	94,66	95,27	2,48
3	Komputer Desktop	6,42	5,60	4,84	4,77	4,54	-8,15
4	Komputer Laptop	7,28	10,90	14,84	16,72	8,74	12,70

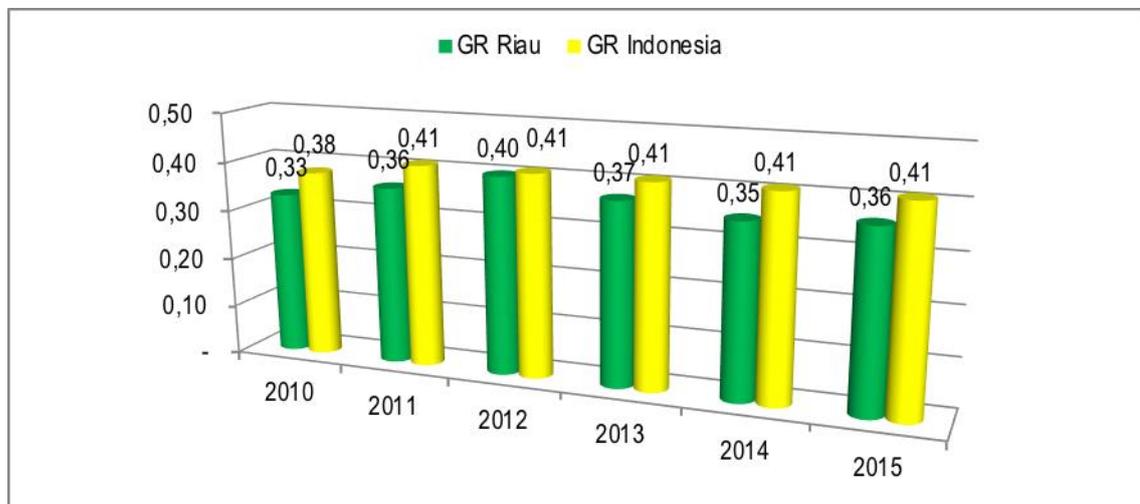
Sumber: BPS Prov. Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Para rentang waktu 2010-2014, terdapat penurunan rumah tangga pengguna telepon sebesar 11,20%. Sedangkan rumah tangga pengguna telepon seluler mengalami peningkatan sebesar 2,48%. Angka ini mengindikasikan adanya peralihan penggunaan telepon dari telepon ke telepon seluler. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya prasarana telekomunikasi nirkabel. Demikian juga, dengan rumah tangga pengguna komputer yang beralih dari desktop ke laptop. Rumah tangga pengguna komputer desktop menurun sebesar 8,15% dan sebaliknya pengguna laptop meningkat sebesar 12,70%.

2.1.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara

Selama periode 2010-2015, angka indeks gini berkisar antara 0,36 – 0,32 dengan trend berfluktuasi menurun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6. Angka indeks gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak dari kategori relatif merata tahun 2010 dan sedang dari tahun 2011-2015.

Gambar 12. Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Riau, BRS 2016

Pencapaian indeks gini Provinsi Riau tahun 2015 sebesar 0,32 lebih rendah dibandingkan indeks gini Indonesia (0,41) meski berada dalam kelompok yang sama yaitu ketidakmerataan sedang.

2.1.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan diantara melaksanakan program pengembangan perumahan dengan cara membangun Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau sebanyak 2.000 unit dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000.000 pada tahun 2017. Selanjutnya program pembangunan infrastruktur baik di pedesaan maupun

perkotaan dilakukan dengan peningkatan kualitas PSU permukiman Kab. Rokan Hulu, pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau, peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kawasan kumuh Provinsi Riau, dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kota. Selain itu, program penyehatan lingkungan permukiman terus dilakukan dimana pada tahun 2017 dilaksanakan pembangunan drainase Provinsi Riau di Pekanbaru sepanjang 8,96 Km, Kampar 300 meter, inhil 300 meter, dumai 300 meter, Meranti 300 meter, dan Kuansing 300 meterserta pembangunan TPA Regional.

Kelancaran perhubungan darat sangat tergantung dengan kondisi prasarana perhubungan darat, seperti jalan dan jembatan. Pada tahun 2015, panjang jalan 26.031,41 km, dengan rincian panjang jalan negara 1.336,62 km, panjang jalan provinsi 3.033,32 km dan panjang jalan kabupaten/kota 21.661,47 km. Jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.278,21 km (45,65 persen), jalan dalam kondisi sedang sepanjang 537,93 km (19,21 persen), dan 35,14 persen lainnya dalam kondisi rusak atau rusak berat. Jumlah jembatan pada tahun 2016 sebanyak 845 unit. Sementara jumlah jembatan menurut konstruksinya, 391 unit jembatan beton, 64 unit jembatan komposit, dan 390 unit jembatan rangka (BPS, 2017). Panjang jalan yang terdapat di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Tahun 2009 – 2013

No.	Kabupaten/Kota	Kewenangan		
		Negara	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Kuantan Singingi	123.42	189.70	1,989.85
2	Indragiri Hulu	155.53	399.38	1,737.05
3	Indragiri Hilir	162.32	280.15	1,198.54
4	Pelalawan	127.73	233.59	2,353.57
5	Siak	110.86	155.00	1,561.24
6	Kampar	111.42	399.05	2,219.17
7	Rokan Hulu	-	503.58	2,140.00
8	Bengkalis	100.73	82.60	1,318.58
9	Rokan Hilir	179.96	217.98	1,968.15
10	Kepulauan Meranti	-	131.24	960.08
11	Pekanbaru	133.27	127.51	2,654.00
12	Dumai	130.38	140.12	1,561.24
	Riau	1,335.62	2,799.90	21,661.47

Sumber: BPS (2017)

Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan dapat dilakukan salah satunya dengan menetapkan target pencapaian secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau adalah banjir dan kebakaran lahan sehingga berakibat kepada kabut asap. Bencana alam lainnya seperti gempa, dan tsunami hampir tidak pernah terjadi. Bencana banjir yang berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri

(Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan), dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir). Frekwensi dan jumlah korban bencana alam di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Frekuensi (kali)	41	21	12	27	24	-10,16
2	Korban						
	a. Meninggal (orang)	11	3	0	2	0	-
	b. Menderita (orang)	859.027	54.253	7.669	16.134	5.973	-62,98
3	Rumah						
	a. Hancur (Unit)	339	225	315	188	162	-13,70
	b. Rusak (Unit)	5.460	14	0	0	0	-

Sumber : RPJMD Revisi Provinsi Riau (2017)

Selama periode 2009–2013, frekuensi bencana alam banjir di Provinsi Riau berfluktuatif dengan trend menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 10,16% per tahun. Frekuensi bencana alam banjir cenderung menurun diikuti dengan jumlah korban meninggal yang menurun, hingga 0%. Sejalan dengan menurunnya frekuensi bencana alam banjir maka jumlah korban banjir yang menderita semakin menurun, dengan rata-rata penurunan jumlah korban banjir yang menderita menurun sebesar 62,98% per tahun. Rumah korban banjir yang rusak akibat banjir juga menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 13,70% per tahun dan jumlah rumah yang rusak menuju 0 unit rumah.

Selain itu, untuk membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan dengan membangun rumah layak huni. Pembangunan rumah layak huni khususnya bagi keluarga miskin merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Pada tahun 2009, jumlah rumah layak huni yang dibangun melalui APBD Provinsi Riau sebanyak 800 unit yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota, kecuali Kabupaten Kepulauan Meranti yang pada tahun 2009 sedang berproses menjadi Kabupaten Baru sehingga pencatatan jumlah unit rumah layak huni masih tergabung dengan Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2010 hingga 2013, jumlah unit pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin berfluktuatif menurun. Pada tahun 2013, jumlah unit rumah layak huni yang dibangun hanya sebanyak 640 unit. Jumlah rumah layak huni yang telah dibangun selama ini jauh lebih rendah dibanding jumlah keluarga miskin yang menempati rumah yang belum layak. Pada tahun 2013, dengan jumlah penduduk miskin 522.530 ribu jiwa, setidaknya masih perlu dibangun sebanyak 30.000 unit rumah layak huni bagi keluarga miskin. Perkembangan pembangunan jumlah rumah layak huni dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Tahun 2009 – 2013

No	Kabupaten/kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kuantan Singingi	75	60	20	30	26
2	Indragiri Hulu	120	80	20	45	52
3	Indragiri Hilir	90	80	40	50	60
4	Pelalawan	80	60	30	24	78
5	Siak	55	80	30	30	39
6	Kampar	90	60	30	60	111
7	Rokan Hulu	75	60	20	45	26
8	Rokan Hilir	55	55	20	30	31
9	Bengkalis	75	70	30	25	81
10	Kep. Meranti	0	60	30	45	60
11	Pekanbaru	45	85	20	10	30
12	Dumai	40	50	20	26	13
	Jumlah	800	800	320	400	640

Sumber : RPJMD Revisi Provinsi Riau (2017)

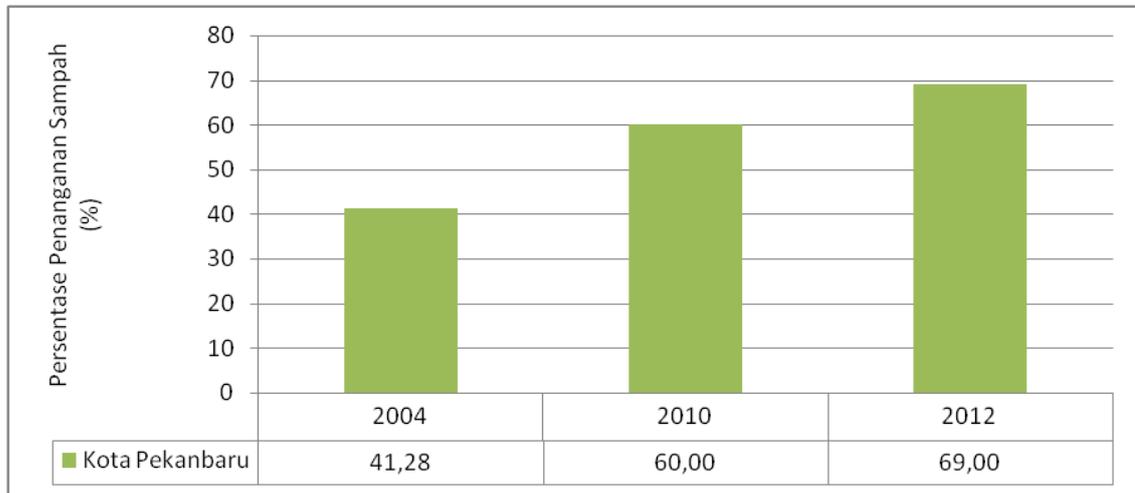
2.1.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Propinsi Riau telah melaksanakan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada tahun 2017 melalui peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER) pada 19 perusahaan dan pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3. Selain itu, program peningkatan disiplin aparatur juga terus dilakukan melalui sosialisasi Program 3R di 12 kab/kota. Program penyehatan lingkungan permukiman dilaksanakan dengan membangun TPA Regional serta program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui pengawasan dan pembinaan pelaku usaha tambang mineral logam, bukan logam dan batuan di Provinsi Riau.

Selanjutnya untuk mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pengelolaan sampah. Total timbunan sampah yang terangkut dan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berjumlah sekitar 41,28%, dibakar 35,59%, dikubur 7,97%, dibuang sembarangan (ke sungai, saluran, jalan, dan sebagainya) 14,01% dan yang terolah (dikompos dan didaur ulang) hanya 1,15%. Jumlah sampah yang telah dikelola dan terangkut sampai ke TPA kota Pekanbaru baru mencapai 120 m³/hari atau sekitar 60% pada tahun 2010 seperti yang terlihat pada Gambar 4.32. Sedangkan dari hasil studi yang dilakukan KLH di beberapa kota tahun 2012, pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur 10%, dikompos dan disaur ulang 7%, dibakar 5%, dan sisanya tidak terkelola 7%. Diperkirakan persentase ini relatif tidak banyak berubah hingga tahun 2014. Berdasarkan prediksi KLH (2000), jumlah sampah rata-rata yang dihasilkan per kapita per hari adalah 1 kg. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan volume sampah yang dihasilkan. Dengan jumlah penduduk saat ini, diperkirakan volume sampah yang dihasilkan di Provinsi Riau

mencapai 6 ribu ton per hari (180 ribu ton per bulan atau 2,16 juta ton per tahun). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa, maka diperkirakan jumlah timbunan sampah nasional mencapai 220 ribu ton per hari. Jadi, volume sampah yang dihasilkan di Provinsi Riau mencapai 2,73% dari volume sampah nasional. Perkembangan jumlah sampah yang dapat dikelola di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Persentase Penanganan Sampah Kota Pekanbaru



Sumber: Bappeda (2015)

2.1.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Indek Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Riau mengalami perubahan setiap tahun dan katagori/level tergantung dari kualitas 3 (tiga) komponen dalam IKLH. Kecendrungan dan pola perubahan IKLH Provinsi Riau dalam periode 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 12. Perubahan IKLH Provinsi Riau dalam periode 2011-2016

INDEKS	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Udara	67,06	51,91	52,89	60,30	60,30	72,40
Air	55,60	54,30	48,71	47,53	46,39	50,75
Tutupan Hutan	60,49	50,65	50,60	50,60	52,66	49,45
IKLH	61,00	52,12	50,72	52,59	53,07	56,73

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016)

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sejak 2011 hingga 2016, terjadi fluktuasi IKLH yang signifikan. Mulai tahun 2013, IKLH mengalami kenaikan yang mengindikasikan kecendrungan membaiknya kualitas udara, air dan tanah di Provinsi Riau. Namun, IKLH Provinsi Riau tahun 2016 sebesar 56,73 ini merupakan yang terendah di Pulau Sumatera dan masuk dalam katagori sangat kurang, berada jauh di bawah IKLH rata-rata nasional sebesar 65,73.

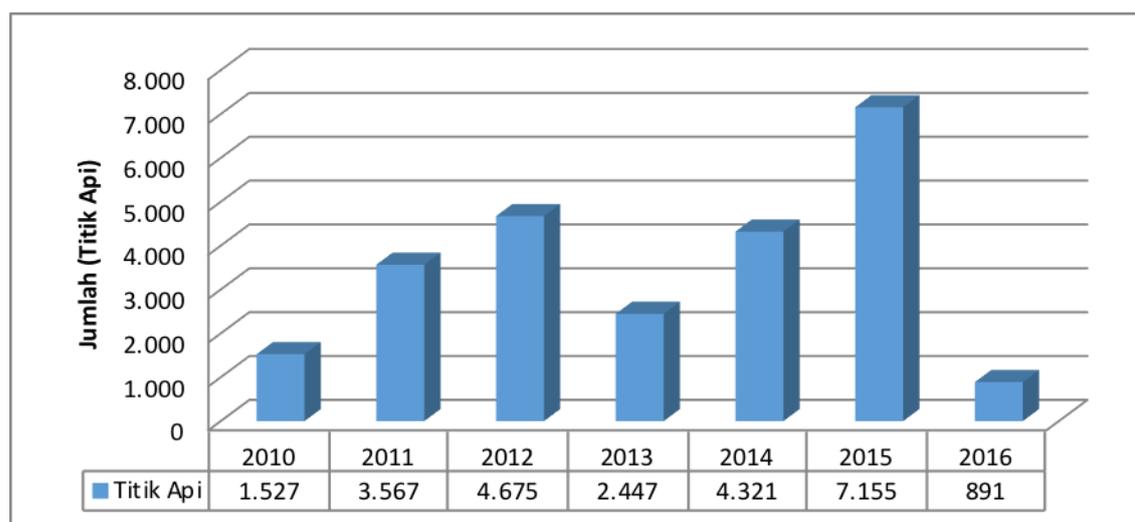
Tabel 13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sumatera Tahun 2016

No.	Provinsi	IKU	IKA	IKTL	IKLH
1	Aceh	86.30	70.36	66.38	73.55
2	Sumatera Utara	79.20	75.43	50.21	66.47
3	Sumatera Barat	82.90	40.00	57.97	60.06
4	Riau	72.40	50.75	49.45	56.73
5	Jambi	88.10	61.00	48.21	64.01
6	Sumatera Selatan	81.60	84.05	43.93	67.27
7	Bengkulu	85.40	80.97	56.31	72.43
8	Lampung	77.50	68.10	41.66	60.34
9	Bangka Belitung	80.40	82.08	45.33	66.88
10	Kepulauan Riau	78.60	80.00	56.53	70.19
Nasional		81.61	60.38	57.83	65.73

Sumber: KLHK, 2016.

Selama 2010 – 2016, jumlah titik api yang terjadi di Provinsi Riau fluktuatif seperti pada Gambar 5. Titik api terbanyak terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah 7.155 dan menurun secara drastic pada tahun 2016 menjadi 891 titik api yang merupakan titik api terendah sejak tahun 2010.

Gambar 14. Jumlah Titik Api Tahun 2010 – 2016 di Provinsi Riau



Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2011- 2012), BMKG Riau (2012 -2014) dan KemenLHK (2015-2016).

2.1.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Potensi perikanan tangkap Provinsi Riau yang dimanfaatkan sebesar 24,81% dan potensi perikanan budidaya sebesar 0,33%. Rendahnya pemanfaatan potensi tersebut antara lain disebabkan oleh kerusakan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove sebesar

96,13% yang merupakan habitat biota air termasuk ikan untuk nursery dan pembesaran bagi ikan air asin dan payau. selain itu juga disebabkan oleh kerusakan ekosistem terumbu karang, yang merupakan akibat cara penangkapan yang destruktif.

Selanjutnya, Provinsi Riau memiliki kurang lebih 101 pulau-pulau kecil, mengindikasikan tersedianya potensi wisata taman laut yang masih perawan akan tetapi potensi ini belum digali dan dipromosikan secara optimal, contoh wisata bahari di Pulau Rupat dan Pulau Jemur.

Perairan pesisir dan laut Provinsi Riau yang luas beserta kekayaan alamnya memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Riau guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Riau menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumberdaya alam hayati termasuk ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumberdaya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi.

Produksi Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya secara keseluruhan pada tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Perkembangan Produksi Tahun 2009-2013 (ton)

Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)
	2009	2010	2011	2012	2013	
Penangkapan	87.898,1	89.293,70	104.044,70	111.678,30	110.734,00	25,98
1. Laut	75.517,5	77.102,5	90.502,40	95.609,30	93.279,00	25,52
2. Perairan Umum	12.380,6	12.191,20	13.542,30	16.069,00	17.455,00	40,99
Budidaya						
1. Laut	0,00	11,00	2,90	1,73	4,97	54,88
2. Tambak	963,39	1.812,28	5.753,00	645,87	329,27	-65,82

Sumber: Renstra Perikanan dan Kelautan, 2016

Meskipun produksi perikanan tangkap laut cenderung meningkat dari tahun 2009 sampai tahun 2013 tetapi produksi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Potensi perikanan wilayah pesisir dan laut dapat dilihat Tabel 15.

Tabel 15. Potensi perikanan dan kelautan Provinsi Riau

No.	Uraian	Potensi (ton)
1	Perikanan tangkap:	446.258
	a. WPP 571 (Selat Malaka, Rohil, Bengkalis, Meranti, Siak dan Dumai)	84.928
	b. WPP 711 (Laut China Selatan, Inhil dan Pelalawan)	361.430
2	Perikanan budidaya:	
	a. Payau	37.399,40
	b. Laut	63.051,85

Sumber: Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau 2014 - 2015

Adapun potensi lain sumberdaya kelautan dan pesisir dan adalah sebagai berikut :

a. Mangrove

Hutan mangrove di Provinsi Riau seluas 145.102 ha atau 30 % dari luas hutan bakau di Sumatera (507.775 hektar). Habitat mangrove dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan utamanya budidaya tambak, sebagai habitat biota air termasuk ikan untuk nursery dan pembesaran bagi ikan air asin dan payau. Mangrove yang tumbuh di kawasan pesisir sangat rentan terhadap gangguan atau kerusakan. Hingga saat ini hutan mangrove yang mengalami kerusakan seluas 139.496 ha dengan kondisi kurang rapat dan hanya 5.601 ha yang tergolong baik (rapat). Akibat tekanan kepentingan di wilayah pesisir yang menimbulkan penebangan/pengrusakan sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Kerusakan hutan bakau mempengaruhi keberlanjutan ekosistem perairan pantai, khususnya ketersediaan stock ikan (Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016).

Secara umum fungsi ekosistem hutan bakau sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan bahan organik yang tinggi
2. Mempunyai kemampuan meredam gelombang dan arus laut
3. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi
4. Melindungi pantai dari gelombang pasang dan angin kencang
5. Merupakan daerah pemijahan dan asuhan bagi beberapa jenis ikan, kerang, udang dan kepiting
6. Menyediakan bahan baku untuk berbagai kebutuhan manusia
7. Sebagai sarana rekreasi
8. Memberikan pendapatan bagi masyarakat secara langsung dari hasil hutan maupun tidak langsung.

b. Terumbu karang

Ekosistem terumbu karang yang terdiri dari karang penghalang dan karang tepi. Berdasarkan geografis, penyebarannya meliputi Perairan di Kabupaten Rokan Hilir dengan luas 1.2 Ha. Akibat cara penangkapan ikan yang destruktif, terumbu karang di Provinsi Riau banyak yang mengalami kerusakan. Untuk itu pemerintah provinsi

kedepan akan melakukan upaya rehabilitasi ekosistem terumbu karang dengan melakukan kegiatan pembuatan terumbu karang buatan sebagai tempat tumbuh terumbu karang. Fungsi penting terumbu karang dalam ekosistem pesisir sebagai berikut:

1. Sumber produktifitas primer berkisar antara 1500-3500 gram C/m²
2. Lokasi sumber makanan yang melimpah
3. Stabilisasi dasar karena terumbu hidup menempal pada dasar dengan kuat
4. Tempat berlindung organisme
5. Tempat pemijahan dan pertumbuhan organisme
6. Peredam arus dan gelombang
7. Sumber plasma nutfah (keanekaragaman biota laut) yang tinggi
8. Lokasi wisata
9. Sumber pendapatan masyarakat pesisir

c. Pulau-pulau Kecil dan Wisata bahari

Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan (2016), Provinsi Riau diketahui memiliki kurang lebih 101 pulau-pulau kecil, berada di Kabupaten Rokan Hilir (15 Buah), Kabupaten Inderagiri Hilir (25 buah), Kabupaten Bengkalis (17 Buah), Kabupaten Kepulauan Meranti (12 Buah) dan Kabupaten Pelalawan (32 Buah). Berada pada daerah perbatasan dengan Malaysia yaitu Pulau Batu Mandi dan Pulau Rupat. Dari 101 buah pulau tersebut yang berpenghuni sebanyak 26 buah pulau dan sisanya tidak berpenghuni. Besarnya jumlah pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni mengindikasikan tersedianya potensi wisata taman laut yang masih perawan akan tetapi potensi ini belum digali dan dipromosikan secara optimal. Contohnya wisata bahari di Pulau Rupat dan Pulau Jemur.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai kekayaan dan keragaman yang tinggi dalam bentuk ekosistem, jenis biota, struktur adat dan budayanya. Jumlah lokasi wisata bahari di Provinsi Riau yang sudah dikembangkan adalah sebanyak 1 lokasi yaitu di Pulau Rupat dan menunjukkan perkembangan yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan sektor lain.

2.1.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Luas hutan Provinsi Riau Tahun 2016 adalah 9.020.232,00 hektar. Bila dirinci menurut fungsinya sesuai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluas 633.420,00 hektar (7,02%) adalah hutan suaka alam/taman wisata, hutan lindung seluas 234.015,00 hektar (2,59%), kemudian hutan produksi tetap seluas 2.331.891,00 hektar (25,85%) dan hutan produksi terbatas seluas 1.031.600,00 hektar (11,44%).

Tabel 16. Luas Hutan Menurut Fungsi Tahun 2015 Berdasarkan TGHK Update SK Nomor: 878/Menhut II/2014

No	Fungsi	Distribusi	
		Luas (Ha)	%
1	Hutan Suaka Alam/Taman Wisata	633.420,00	7,02
2	Hutan lindung	234.015,00	2,59
3	Hutan Produksi	-	0,00
	- Tetap	2.331.891,00	25,85
	- Terbatas	1.031.600,00	11,44
4	Hutan produksi yang dapat dikonversi/APL	1.268.767,00	14,07
5	Hutan Mangrove/Bakau	120.123,00	1,33
6	Areal Penggunaan Lain (APL) Non Kawasan Hutan	3.400.416,00	37,70
Jumlah		9.020.232,00	100,00

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka, 2016

Kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau menunjukkan angka yang berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2011 kerusakan kawasan hutan seluas 1.253.799,40 hektar meningkat menjadi 4.793.369,09 hektar pada tahun 2015. Terdapat tiga kondisi lahan kritis yaitu sangat kritis seluas 142.081,57 hektar, agak kritis seluas 2.998.285,94 hektar dan kritis seluas 1.653.001,58 hektar.

Tabel 17. Kerusakan Kawasan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Riau Tahun 2011 -2015

No	Keterangan	Tahun					Rata-Rata Pert. (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Kerusakan Kawasan Hutan	1.253.799,40	1.195.807,75	1.536.653,99	1.039.531,17	4.793.369,09	88,16
	Sangat Kritis	-	-	-	-	142.081,57	-
	Agak Kritis	-	-	-	-	2.998.285,94	-
	Kritis	-	-	-	-	1.653.001,58	-
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	61.000,00	85.000,00	95.000,00	-	-	-

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka, 2012; 2013; 2014; 2015 dan 2016

Luas lahan kritis dalam kawasan hutan berdasarkan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) di Provinsi Riau per kabupaten kota tahun 2014 tercatat seluas 1.039.531,17 hektar dengan lokasi terluas ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu seluas 195.702,02 hektar (18,83%), Kabupaten Kampar seluas 159.786,38 hektar (15,37%) dan Kabupaten Bengkalis seluas 127.019,19 hektar (12,22%) dan Kabupaten Rokan Hilir seluas 124.512,53 hektar (11,98%) dengan total kerusakan pada empat wilayah tersebut seluas 607.020,12 hektar (58,39%). Sementara kabupaten kota lainnya kurang dari 10%.

Tabel 18. Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten Kota	Luas Lahan Kritis (Ha)					Jumlah (ha)	Distribusi (%)
	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Hutan Prod Terbatas	Hutan Prod Tetap			
Kuantan Singingi	19.738,21	5.037,97	38.002,69	-	62.778,87	6,04	
Indragiri Hulu	4.151,86	62,69	51.774,48	9.209,26	65.198,29	6,27	
Indragiri Hilir	1.849,53	-	83.275,19	110.577,30	195.702,02	18,83	
Pelalawan	-	2.016,75	84.112,57	4.208,97	90.338,28	8,69	
Siak	-	2.217,48	24.259,44	63.583,34	90.060,26	8,66	
Kampar	11.924,72	15.482,05	120.994,04	11.385,56	159.786,38	15,37	
Rokan Hulu	11.317,16	-	60.627,53	22.013,55	93.958,23	9,04	
Bengkalis	-	15.346,72	91.231,14	20.441,33	127.019,19	12,22	
Rokan Hilir	27.456,05	146,96	47.473,31	49.436,21	124.512,53	11,98	
Kepulauan Meranti	-	-	50,29	42,58	92,87	0,01	
Pekanbaru	-	-	8.436,11	-	8.436,11	0,81	
Dumai	-	-	5.709,39	15.938,75	21.648,14	2,08	
Provinsi Riau	76.437,53	40.310,62	615.946,17	306.836,85	1.039.531,17	100,00	

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka, 2015

2.1.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

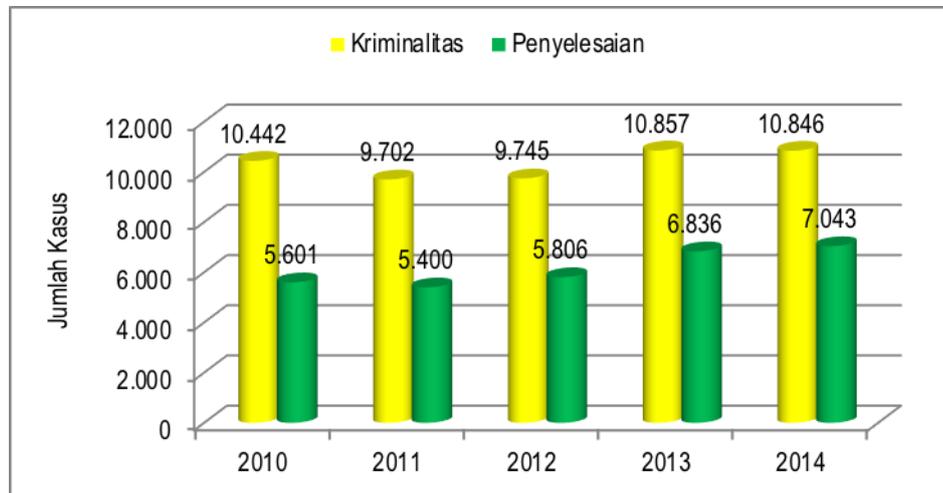
Berdasarkan data BPS Provinsi Riau Tahun 2016, perkara perdata dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau tahun 2014 tercatat 866 gugatan dan 1.102 permohonan. Sedangkan perkara pidana dalam tahun yang sama tercatat 6.784 perkara biasa dan 81.436 perkara lalu lintas. Jumlah Perkara tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2014 sebanyak 135 perkara yang terdiri dari 34 sisa perkara tahun 2013 dan 101 perkara baru yang masuk pada tahun 2014. Adapun yang telah yang telah diputuskan pada tahun 2014 sebanyak 99 perkara.

Kasus kejahatan yang dilaporkan kepada jajaran Polisi Daerah Riau dari seluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2014 tercatat sebanyak 10.846 kasus yang dilaporkan, 7.043 diantaranya dapat diselesaikan. Jenis kriminalitas berupa tindak pidana perkosaan sebanyak 293 kasus, Penculikan sebanyak 9 kasus, kejahatan terhadap jiwa/pembunuhan sebanyak 28 kasus, penganiayaan berat sebanyak 355 kasus, penyalahgunaan senjata api sebanyak 19 kasus, mempekerjakan anak dibawah umur sebanyak 1 kasus, Perdagangan manusia 2 kasus, korupsi sebanyak 10 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 308 kasus, pelanggaran HAM terhadap anak sebanyak 93 kasus, dan penyuaipan sebanyak 1 kasus.

Jika dikaitkan dengan perkembangan tindak kriminalitas dan penyelesaiannya di Provinsi Riau tahun 2010-2014 dapat diperoleh gambaran bahwa selama periode ini, tindak kriminal dan penyelesaian di Provinsi Riau menunjukkan trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, tindak kriminal yang dilaporkan sebanyak 10.442 kasus, menurun menjadi 10.846 kasus pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan peningkatan sebesar 1,17% per tahun. Sebaliknya, penyelesaian kasus kriminal

meningkat dari 5.601 kasus (53,64%) menjadi 7.043 kasus (64,94%) dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 6,17% per tahun. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 15. Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaian Provinsi Riau Tahun 2010-2014



Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015)

Setiap pelaku tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya dengan memperhatikan hak-hak tahanan yang tidak boleh melebihi masa penahanan. Dalam prakteknya di Provinsi Riau, belum ada laporan yang berarti mengenai pelanggaran hal tersebut di berbagai instansi penegak hukum. Adapun jumlah rumah tahanan maupun penjara di Provinsi Riau berdasar data BPS Tahun 2016, sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini.

Tabel 19. Jumlah Lapas, Rutan, Rumah Tahanan menurut Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten	Jumlah Lapas, Rutan dan Cabang Rutan	Tahanan			Narapidana		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kuantan Singingi	1	101	0	101	148	1	149
Indragiri Hulu	1	131	4	135	204	7	211
Indragiri Hilir	1	125	7	832	425	13	438
Pelalawan	-	-	-	-	-	-	-
Siak	1	215	7	222	318	8	326
Kampar	1	254	9	263	363	4	367
Rokan Hulu	1	166	1	167	326	0	326
Bengkalis	1	416	24	440	750	35	785
Rokan Hilir	1	328	21	349	339	15	354
Kepualaun Meranti	1	43	2	45	118	9	127
Pekanbaru	3	472	40	512	1.980	182	2.162
Dumai	1	308	15	323	420	9	429
Jumlah	13	2.559	830	2.689	5.391	283	5.674

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil Riau

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Riau pada tahun 2014 sebanyak 7.930 orang. Dari jumlah tersebut 4.468 adalah pegawai laki-laki dan 3.462 pegawai perempuan. Dari komposisi jumlah antara laki-laki dan perempuan terlihat pegawai yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan, meskipun dalam persentase jumlah yang tidak terlalu terpaut jauh.

Terkait dengan laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan, Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) pada tahun 2015 adalah 2,60, peningkatan nilai reformasi birokrasi sebesar 36,77, raihan opini WTP dari BPK, dan peningkatan nilai keterbukaan informasi sebesar 30,57.

2.1.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011-2016 sebesar 5,95 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut paling besar didorong oleh pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 3655 persen per tahun, diikuti oleh Dana Perimbangan tumbuh 7,92 persen dan PAD tumbuh 7,61 persen, namun PAD di tahun 2016 turun sekitar 10,41 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari Rp. 4,6 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 6942 triliun pada tahun 2016. Namun realisasi anggaran pada tahun 2016 mengalami penurunan karena adanya rasionalisasi bagi hasil sumberdaya alam akibat turunnya harga minyak mentah dunia (*international crude oil price* atau ICP) dan penurunan *lifting* minyak.

Tabel 20. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (%)

No	Jenis Penerimaan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan Asli Daerah	40,62	37,81	38,97	39,90	50,29	44,80
2	Dana Perimbangan	59,31	52,85	51,61	52,04	36,91	55,16
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,06	9,34	9,42	8,06	12,80	0,04
4	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	PAD terhadap PDRB	0,46	0,46	0,45	0,48	0,53	0,46

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, diolah

Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. Perkembangan jumlah investor di Provinsi Riau, merupakan hasil dari adanya kerjasama pemerintah swasta dan masyarakat, di mana selama periode 2011–2015 cenderung berfluktuatif meningkatbaik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.109. Pada tahun 2011 jumlah investor PMDN sebanyak 64 investor meningkat menjadi 285 investor pada tahun 2017 atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 34,91% per tahun. Nilai

investasi PMDN tumbuh rata-rata 13,31% dari Rp. 7,463 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 10,83 triliun tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah investasi PMDN di Riau relatif tinggi dibandingkan dengan nilainya yang berarti ada perubahan skala investasi relatif kecil per unit proyek. Perkembangan investasi PMDN dan PMA di Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Jumlah Investor PMDN dan PMA Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Uraian	Perkembangan							Pert. Rata2
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
PMDN								
Proyek (unit)	64	81	168	129	180	289	285	34,91
Nilai (Rp. Milyar)	7.462,60	5.450,40	4.874,27	7.707,50	9.943,04	6.613,70	10.829,80	13,31
Penyerapan TK	15.769	12.865	33.284					70,15
PMA								
Proyek (unit)	56	51	64	76	243	394	285	48,25
Nilai (US\$ juta)	212,34	1152,85	1304,94	1369,53	643,39	869,10	1061,10	77,54
PenyerapanTK	3.038	12.194	26.095					207,69

Sumber: BPMD Provinsi Riau (2016)

Demikian pula dengan jumlah investasi PMA di Provinsi Riau tahun 2011 sebanyak 56 proyek dan meningkat menjadi 285 proyek pada tahun 2017 atau naik 48,25%. Sedangkan nilai investasi PMA pada tahun 2011 sebanyak 212,34 juta dolar AS dan meningkat menjadi 1.1061,10 juta dolar AS pada tahun 2017 atau rata-rata tumbuh per tahunan 77,54%. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa skala investasi PMA mengalami sedikit penurunan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan nilai proyek lebih rendah dari pertumbuhan jumlah proyek. Penurunan skala investasi ini dapat disebabkan oleh investor yang melakukan investasi terutama pada bidang industri hanya menjalankan investasi pada pengembangan produk industri, karena mereka tidak lagi melakukan investasi pada pembangunan infrastruktur sebab infrastruktur kebutuhan investor sudah disediakan oleh badan pengelola kawasan industri.

Selama periode 2011–2017, jumlah proyek dan nilai investasi terbesar adalah di sektor Perkebunan diikuti sektor industri pengolahan makanan, Pada tahun 2011, penyerapan tenaga kerja yang pada perusahaan PMDN adalah 15.769 tenaga kerja dan perusahaan PMA sebanyak 3.038 tenaga kerja. Kondisi daya serap tenaga kerja PMDN dan PMA meningkat masing-masing menjadi 33.284 orang dan 12,194 orang pada tahun 2013 atau tumbuh rata-rata 70,15% dan 207,69%. Hal ini menggambarkan bahwa pada periode ini selain terjadinya kenaikan nilai investasi juga terjadi perubahan investasi dari usaha perkebunan kelapa sawit menjadi pengolahan hasil pekebunan (pabrik kelapa sawit).

Ketersediaan Data. Publikasi yang dilakukan kerjasama antara Bappeda dengan BPS terutama terkait dengan publikasi Riau Dalam Angka, PDRB Provinsi Riau,

Kabupaten/Kota Dalam Angka dan PDRB untuk masing-masingnya selalu disediakan atau 100% dilaksanakan.

2.2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.2.1. Permasalahan dan Tantangan Pilar Sosial

Permasalahan kemiskinan adalah: (1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama pada sembilan jenis PMKS termasuk keluarga miskin meningkat sebesar 4,95% per tahun; (2) Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan sehingga terjadi ketimpangan angka kemiskinan; (3) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial; dan (4) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti optimalisasi penerimaan dan pemanfaatan dana umat dalam peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan RT miskin.

Permasalahan dalam penangan kelaparan, ketahanan pangan dan produksi pertanian berkelanjutan adalah: (1) Tingginya penurunan rasio produksi pangan terhadap kebutuhan selama periode tahun 2010-2015, seperti beras turun sebesar 11,87% per tahun, jagung turun sebesar 17,06% per tahun. Penurunan rasio produksi ini terutama disebabkan oleh laju peningkatan luas panen pada komoditas tidak sebanding dengan perkembangan jumlah penduduk; (2) Rendahnya rasio produksi dan konsumsi daging ruminansia hanya mencapai 0,37; (3) Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (4) Tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah; (5) Penganeka ragam/ diversifikasi pangan masih terbatas; dan (6) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.

Permasalahan pangan untuk subsektor tanaman pangan dan hortikultura adalah: (1) Tingginya laju penurunan luas panen sebesar 7,21% per tahun atau 60.686 hektar dari tahun 2011 ke tahun 2015 dan produksi turun sebesar 5,17% per tahun atau 172.965 ton dari tahun 2011 ke tahun 2015 pada tanaman pangan khusus komoditas padi dan palawija, dan rendahnya peningkatan produktivitas dan bahkan terjadinya penurunan produktivitas komoditas padi ladang dan kacang hijau; (2) Lambatnya perkembangan teknologi pada komoditas padi dan palawija tercermin dari rendahnya produktivitas komoditas tersebut; (3) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan; (4) Tingginya ketergantungan komoditas pangan dan palawija pada daerah lain; (5) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian; (6) Rusaknya infrastruktur jalan, kesuburan lahan dan irigasi di daerah sentra produksi; (7) Tingginya konversi lahan pertanian ke sektor lainnya; (8) Rendahnya perlindungan terhadap petani produsen; (9) Terbatasnya rumah potong hewan (RPH) modern yang berstandar SNI; (10) Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian yang hanya 0,88% per tahun.

Permasalahan pangan pada subsektor perikanan adalah: (1) Rendahnya produktivitas perikanan dari wilayah kabupaten Kota yang memiliki perairan laut dan umum yang luas seperti Kabupaten Bengkalis dan Kep. Meranti; (2) Kurangnya sarana

dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum; (3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; (3) Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi terutama pada perikanan jenis tambak; (4) tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan; (5) Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah; dan (6) Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur, dimana industri pengolahan ikan baru pada tahapan Industri Penggaraman dan Pengeringan Ikan dengan kode ISIC-10211.

Permasalahan pangan sektor industri pengolahan pangan adalah: (1) Rendahnya kapasitas industri pengolahan akibat terbatasnya industri pendukung produksi dan operasional (2) Masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan, sekitar 3,25% per tahun; (3) Rendahnya nilai tambah produk industri; (4). Kurang jenis industri pengolahan yang berkembang di daerah ini, yaitu hanya lebih kurang 10% dari industri nasional; (5) Jumlah dan kualitas SDM industri pengolahan yang masih rendah; (6) Inovasi produk masih rendah terutama pada produk akhir; (7) Penguasaan teknologi dalam industri pendukung produksi dan operasional yang masih rendah; dan (8) Ketergantungan bahan pendukung produksi dalam industri pengolahan; (9) infrastruktur dasar pendukung industri pengolahan yang belum memadai dalam percepatan pembangunan industri pengolahan dan industri pendukungnya baik produksi dan operasional; (10) belum beroperasinya kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri; (10) Rendah kontribusi industri kecil dan menengah akibat pembinaan dan pengembangan usaha yang terbatas; (11) Rendahnya kualitas SDM IKM dalam perencanaan dan pengembangan usaha; (12) belum adanya target pengembangan yang jelas untuk peningkatan skala usaha IKM.

Permasalahan bidang kesehatan adalah: (1) Masih timpangnya angka harapan hidup (AHH) antara wilayah, dimana pada tahun 2015 terdapat 11 kabupaten kota yang AHH yang lebih rendah dari rata-rata AHH provinsi Riau sebesar 70,84 tahun, dan AHH terendah terdapat di Kabupaten Kep. Meranti yaitu 66,72 tahun. Rendahnya AHH tersebut akibat aksesibilitas pelayanan kesehatan yang masih rendah terutama bagi kelompok penduduk miskin, dimana Kabupaten Kep. Meranti memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Riau sebesar 34,08%, hal menunjukkan adanya korelasi antara tingkat kemiskinan dengan pelayanan akses kesehatan yang masih rendah sehingga berakibat pada rendah AHH tersebut; (2) Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk di kabupaten/kota dimana rata-rata 1 puskesmas harus melayani 29.329 penduduk dan 1 rumah sakit melayani 96.964 penduduk; (3) Sistem kesehatan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang tercermin dari belum meratanya sebaran dokter dimana Kabupaten Indragiri Hilir hanya memiliki 16,12 dokter untuk 100.000 penduduk yang jauh di bawah standar nasional yaitu 40 dokter per 100.000 penduduk; (4) Persalinan yang difasilitasi terjadi penurunan dimana pada tahun 2015 hanya 59,00% akibat dari adanya perubahan dalam indikator perhitungan; (5) Optimalisasi sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi promotif dan

preventif masih rendah; (6) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat belum optimal.

Permasalahan bidang pendidikan di provinsi Riau adalah masih terdapat 1,33% penduduk yang berumur 7-12 tahun (SD) yang belum dan atau tidak bersekolah, penduduk umur 13-15 tahun (SMP) 5,64% yang belum dan atau tidak bersekolah, penduduk umur 16-18 tahun (SMA) 24,70% belum dan atau tidak bersekolah. Sehingga kondisi ini menyebabkan APM SD/MI yang masih kurang dari 100%. Sementara APM-SMP/MTs baru mencapai 76,44% dan APM-SMA/MA sebesar 54,59%. Masih rendahnya APM pada jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/MA telah menjadi salah satu penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah, dimana pada tahun 2015 baru mencapai 8,49 tahun dan terdapat tujuh kabupaten dimana rata-rata lama sekolahnya di bawah rata-rata lama sekolah provinsi yaitu Kabupaten Kuansing, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Kep. Meranti dan yang paling rendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir hanya selama 6,82 tahun. Namun secara umum Provinsi Riau belum mencapai sasaran wajib belajar sembilan tahun. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah tersebut disebabkan oleh aksesibilitas terhadap sekolah belum meratabaik sarana dan prasarana (ruang kelas dan ruang guru yang layak, laboratorium, perpustakaan dan pendukungnya) serta ketersediaan guru yang merata baik dari aspek jumlah dan kualifikasi per mata pelajaran pada setiap jenjang pendidikan serta masih rendahnya kualitas dalam proses pembelajaran akibat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang masih rendah, terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus (untuk semua jenjang pendidikan). Pengelolaan pendidikan belum terdesain dengan baik sesuai dengan kebutuhandan potensi wilayah. Belum optimalnya pendataan terkait dengan kondisi sekolah secara menyeluruh menurut indikator SPM, misalnya berapa persen capaian indikator dari 24 indikator SPM tingkat pendidikan SD, 26 indikator SPM tingkat pendidikan SMP dan 28 indikator SPM tingkat pendidikan SMA serta termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah. Kondisi pendidikan provinsi Riau.

Permasalahan kesetaraan gender adalah: Rendahnya partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan, serta masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi dan profesional.

2.2.2. Permasalahan dan Tantangan Pilar Ekonomi

Di dalam menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua permasalahan utama adalah: (1) Belum optimalnya cakupan pelayanan energi listrik dimana masih terdapat sebanyak 12,19% RT yang belum terlayani oleh PLN dan Non PLN; (2) Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan; (3) Belum optimalnya konservasi energi dan sumber daya mineral serta pendayagunaannya.

Di dalam mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua, permasalahan utamanya adalah (1) rendahnya nilai tambah produksi

sektor pertanian; (2) belum berkembangnya industri pengolahan; (3) rendahnya serapan tenaga kerja dari sektor perekonomian *non-tradable*; (4) terjadinya peningkatan angka kemiskinan; (5) kualitas tenaga kerja masih rendah akibat rata-rata lama sekolah rendah (6) belum sinkronnya penyediaan tenaga kerja oleh lembaga pendidikan dengan dunia usaha; (7) daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor; dan (8) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk; (9) meningkatnya angka pengangguran terbuka, (10) terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri; (11) rendahnya peningkatan jumlah tamu asing; (12) kurangnya jumlah produk industri kreatif yang menjadi *icon* wisata dimasing-masing daerah.

Di dalam membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi, permasalahan utama yang dihadapi adalah: (1) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan; (2) Rendah pemanfaatan pelabuhan udara Japura, Tempuling dan Pasir Pengaraian karena kondisi pelabuhan udara ketiganya yang masih minim peralatan dalam mengoperasikan pelabuhan udara tersebut (3) belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau, meskipun Riau memiliki 205 pelabuhan umum dan khusus; (4) rendahnya kapasitas industri pengolahan akibat terbatasnya industri pendukung produksi dan operasional; (5) masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan; (6) rendahnya nilai tambah produk industri; (7). kurang jenis industri pengolahan yang berkembang; (8) Inovasi produk masih rendah terutama pada produk akhir; (9) Ketergantungan bahan pendukung produksi dalam industri pengolahan; (10) infrastruktur dasar pendukung industri pengolahan yang belum memadai dalam percepatan pembangunan industri pengolahan dan industri pendukungnya baik produksi dan operasional; (11) belum beroperasinya kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri; (12) rendah kontribusi industri kecil dan menengah akibat pembinaan dan pengembangan usaha yang terbatas; (13) belum adanya target pengembangan yang jelas untuk peningkatan skala usaha IKM; (14) bencana kebakaran hutan dan lahan (gambut) masih menjadi ancaman (15) tingginya emisi gas rumah kaca dan rendahnya pemahaman tentang perubahan iklim; (16) rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (17) Belum dimanfaatkan sistem IT secara online dalam pembayaran pajak dan lainnya; (18). Masih terdapat 6,73% penduduk yang belum mendapatkan akses informasi melalui jasa telekomunikasi nirkabel.

Di dalam mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara, permasalahan utamanya adalah: (1) tingginya ketimpangan kesejahteraan antara petani sawit dengan sektor pertanian lainnya, (2) tingginya ketimpangan produktivitas antara wilayah; sehingga berakibat kontribusi antara wilayah terhadap PDRB tanpa migas yang tidak merata; (3) tingginya tingkat ketimpangan kesejahteraan antara penduduk perkotaan dan pedesaan.

Dalam kerjasama publikasi ini masih terdapat beberapa masalah terkait dengan data yang disajikan antara data provinsi Riau dengan data Kabupaten Kota. Apabila

dijumlahkan atau dikompilasi antara data Kabupaten Kota tidak sama jumlahnya dengan data provinsi. Hal ini dapat disebabkan karena data provinsi lebih dahulu dipublikasikan sehingga data kabupaten kota yang termasuk dalam data provinsi belum sepenuhnya merupakan akumulasi data akhir tahun. Sementara data kabupaten kota sudah merupakan data akhir tahun. Maka ketika dijumlahkan antara data kabupaten kota se Riau lebih besar nilainya dibandingkan data Riau dalam Angka yang dipublikasikan. Sisi lain format penyusunan data antara kabupaten Kota tidak seragam.

2.2.3. Permasalahan dan Tantangan Pilar Lingkungan

Secara umum permasalahan lingkungan di Propinsi Riau sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat kerusakan daerah aliran sungai Riau (Kampar, Siak, Indragiri dan Rokan). Kerusakan DAS berdampak pada meningkatnya kejadian banjir. Faktor-faktor penyebab utama permasalahan ini adalah;
 - Erosi, sedimentasi, abrasi dan penyempitan alur sungai masih tinggi.
 - Koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai masih kurang.
 - Pengelolaan sempadan sungai tidak mengindahkan aturan.
 - Ketersediaan air baku untuk kebutuhan penduduk, pertanian, perkebunan dan industri masih rendah.
 - Rencana pengelolaan sungai yang terpadu belum berjalan.
2. Tingginya tingkat pencemaran akibat pengelolaan limbah (cair, padat dan gas) belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini;
 - Pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan masih tinggi sehingga meningkatkan volume sampah yang dihasilkan.
 - Perilaku masyarakat masih buruk.
 - Kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih kurang.
 - Belum optimalnya pengelolaan kinerja persampahan.
 - Pengelolaan Tempat Pembuangan/Pemrosesan Akhir (TPA) di kabupaten/kota masih bersifat *open dumping*.
 - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal belum memadai.
 - Pengelolaan limbah cair dan padat dari aktivitas pertambangan (batu bara, emas) dan pembangkit listrik belum optimal.
3. Degradasi lahan pertambangan akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Degradasi lahan pertambangan juga diakibatkan oleh faktor-faktor berikut;
 - Eksploitasi bahan tambang tidak mengikuti praktek pertambangan ramah lingkungan (*good mining practices*).
 - Desakan ekonomi.
 - Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
 - Tidak dilaksanakannya reklamasi pasca tambang.
 - Pengawasan Galian C masih lemah.

- Belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya mineral.
4. Tingginya degradasi dan pencemaran di wilayah pesisir. Degradasi dan pencemaran wilayah pesisir disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:
 - Eksploitasi berlebihan terhadap mangrove.
 - Konversi mangrove untuk berbagai kepentingan seperti industri, domestik dan aktivitas lainnya.
 - Persepsi pengelolaan mangrove belum sama.
 - Kurangnya koordinasi dalam tata ruang wilayah
 - Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu belum berjalan.
 5. Tingginya emisi gas rumah kaca Riau akibat lemahnya peran para-pihak dalam perubahan iklim. Penyebab tingginya emisi gas rumah kaca antara lain:
 - Kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca masih tinggi.
 - Pengaturan tata air pada lahan gambut belum optimal.
 - Fungsi kelembagaan perubahan iklim daerah belum optimal.

Masalah kualitas air, Status mutu air 4 sungai besar yaitu Sungai Siak, Rokan, Indragiri dan Sungai Kampar dalam kondisi tercemar berat. Keempat sungai ini mempunyai luas daerah aliran sungai (DAS) yang berbeda tetapi permasalahan kualitas lingkungan yang sama yaitu kritis dan pencemaran.

Salah satu permasalahan yang menyebabkan rawan longsor dan berkurangnya sumber mata air yaitu kebakaran hutan dan lahan. Jumlah penduduk yang terus meningkat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rawan longsor dan berkurangnya sumber mata air. Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan semakin berkurangnya lahan hijau karena difungsikan untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal.

Tantangannya adalah potensi wilayah pesisir dan laut cukup besar tetapi belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal dalam mengembangkan perekonomian wilayah terutama potensi perikanan, wisata, pertambangan, perhubungan dan jasa lingkungan.

2.2.4. Permasalahan dan Tantangan Hukum dan Tata Kelola

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar 16 terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu dicermati sebagai berikut:

Masih tingginya gangguan ketertiban dan keamanan, dimana pada tahun 2015 terdapat 200 kasus dengan enam jenis kasus yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum misalnya terkait dengan politik dan hukum terdapat 106 kasus atau 53% dari enam kasus yang ada, yang diikuti oleh kasus lainnya sebanyak 34 kasus atau 17,00%. Permasalahan utamanya adalah: (1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah; (2) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, permasalahan utamanya adalah: (1) Masih rendahnya partisipasi perempuan pada pembangunan kualitas manusia (2) Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi dan profesional.

Terkait penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, permasalahan utamanya adalah: (1) Tingginya laju rata-rata pertumbuhan penduduk akibat adanya migrasi dan kelahiran penduduk sebesar 2,60% dengan pertumbuhan penduduk perempuan sebesar 2,63% per tahun dan laki-laki sebesar 2,56% per tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk perempuan yang lebih tinggi harus dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja terutama terkait dengan pengembangan industri agro, karena kemajuan sub sistem industri agro sangat ditentukan oleh keterlibatan kaum perempuan dalam industri tersebut; (2) Administrasi penduduk yang belum terdokumentasikan secara baik melalui e-KTP dan susah mengakses data kependudukan, sehingga sulit melakukan estimasi yang akurat terhadap kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan rumah tangga lainnya; dan (3) Belum tergrasinya data kependudukan dengan data kemiskinan; (4) Pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal terutama terkait dengan migrasi.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan kelembagaan yang akuntabel, permasalahan utamanya adalah: (1) Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat pada belum optimalnya tata kelola pemerintahan; dan (2) Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum berjalan dengan baik dan menyebabkan nilai keterbukaan informasi hingga tahun 2015 baru mencapai skor 30,57 (C); (3). Sebagian besar sistem informasi (website) yang terdapat pada SKPD belum memuat data perkembangan kinerja SKPD sesuai dengan tupoksi SKPD tersebut, sehingga data terkait perkembangan kinerja pembangunan daerah sulit didapatkan dan berakibat pada lambatnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; (4) Belum dimanfaatkannya sistem IT secara online dalam pembayaran pajak dan lainnya; (5). Belum ada data terkait dengan SKPD yang sudah melakukan pelayanan administrasi secara online yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi bagi masyarakat; (6). Masih terdapat 6,73% penduduk yang belum mendapatkan akses informasi melalui jasa telekomunikasi nirkabel.

Dalam penyelenggaraan urusan keuangan, permasalahan utamanya adalah: (1) Sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah belum dioptimalkan karena data potensi usaha yang menjadi objek pajak dan retribusi belum terdata dengan baik; (2) Tingginya ketergantungan daerah terhadap pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,66% per tahun; (3) belum adanya insentif daerah terkait dengan pemberian dana bagi daerah yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional; (4) belum optimalnya Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal) oleh daerah atau lembaga yang

mendapatkan dana tersebut; (5) Rendahnya kemampuan daerah dalam mensinkronkan rencana pembangunan yang dapat menjadi potensi penerimaan daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian serta diklat, permasalahan utamanya adalah; (1) Masih terdapat 46,32% pegawai berpendidikan S1 kebawah; (2). Dari 36 indikator pendidikan dan pelatihan hanya terdapat satu indikator terkait dengan pelatihan dalam bidang perencanaan dasar tetapi belum terdapat pelatihan dalam perencanaan pembangunan yang *advance*. (3) Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan komptensinya sehingga pekerjaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal; (4) Pelayanan yang prima dan handal kepada masyarakat pemerintah belum berjalan secara baik dan optimal.

Dalam penyelenggaraan urusan lainnya yang terkait dengan tata kelola pemerintahan, kemananan, HAM dan pelayanan publik, permasalahan utamanya adalah: (1) Penanganan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan dan stabilitas pertahanan serta keamanan masih belum optimal; (2) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah; (3) Penegakkan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM); (4) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*; (5) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur; (6) Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan; (7) Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; (8) Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas; (9) Belum tuntasnya batas administrasi daerah; (10) Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat; (11) Belum adanya Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan anggaran.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan keamanan masyarakat, perlu dipertimbangkan keberadaan kota-kota dan wilayah strategis Provinsi Riau yang berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Provinsi Riau dan harus disikapi secara bijak dan hati-hati dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Riau yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Riau yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Riau baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek.

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

Target dan Indikator Tujuan 1 TPB/SDGs

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana, memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan, dalam rangka menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Tabel 22. Target dan indikator Tujuan 1 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7.67 (2016)	7.41	7.15	6.89	Bappeda Dinas Sosial
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a) Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	1383965 (2016)	1410 704	1412 597	16875 97	Dinas Kesehatan (data jumlah penerima)
	1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	32.52 (2016)	37.62	42.72	48.10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	1.3.1 (c) Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima	pm	pm	pm	pm	Dinas Sosial

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya					
	1.3.1 (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat / Program Keluarga Harapan	pm	pm	pm	pm	Dinas Sosial
1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (a) Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	83.10 (2016)	84.40	85.70	86.00	Dinas Kesehatan
	1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	72,76 (2016)	79,8	95	95	Dinas Kesehatan
	1.4.1 (c) Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin.	54,0 (SDKI 2012)	60,3	60,7	60,9	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (36,26)	84.00 (2015)	89.16	91.65	93.84	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.4.1 (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	40.10 (2016)	43.00	46.00	49.00	Dinas Sosial
	1.4.1 (f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	17.15 (2015)	16.00	14.00	12.00	Dinas Sosial
	1.4.1 (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat					Dinas Pendidikan (kab/kota)
	1.4.1. (h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat					Dinas Pendidikan (Kab/kota)

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	1.4.1 (i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	56,71 (2016)	60,22 (capaian)	63,08	63,24	Dinas Pendidikan
	1.4.1 (j) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	51,71 (2016)	63,19	75,59	87,98	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	80,99 (2016)	82,33	85,83	87,33	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (letak seharusnya diatas)	1.5.1.*Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	na	na	na	na	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	pm	pm	pm	pm	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	na	na	100	100,00	Dinas Sosial
	1.5.1 (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial	na	na	na	na	Dinas Sosial
	1.5.1 (d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	na	na	na	na	Dinas Sosial BPBD
	1.5.1 (e) Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi	pm	pm	pm	pm	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.5.3* Tersedianya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah.	na	na	12	12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.a.1. * Proporsi sumberdaya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk	pm	pm	pm	pm	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	program pemberantasan kemiskinan					
1.a Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan, dalam rangka menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk melaksanakan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2.* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	n	35.00	35.00	35.00	Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs

Arah kebijakan untuk pilar sosial TPB/SDGs mengacu pada RPJMD Provinsi Riau 2014-2019, khususnya terkait dengan goal kemiskinan terdapat pada Misi empat yaitu Menurunkan Kemiskinan. Untuk mencapai tujuan, target dan indikator TPB/SDGs di atas, pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan arah kebijakan untuk tujuan tersebut adalah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap determinan kemiskinan dengan : meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan rumah tangga miskin; mengurangi beban biaya rumah tangga miskin; membangun infrastruktur dasar bagi rumah tangga miskin; mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli rumah tangga miskin; memperluas kesempatan kerja dan usaha rumah tangga miskin dan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja rumah tangga miskin.

Program Tujuan 1 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh OPD mencakup:

1. program bantuan operasional sekolah;
2. pendidikan khusus dan layanan khusus;
3. pelayanan kesehatan penduduk miskin;
4. pembiayaan kesehatan;
5. peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
6. penyediaan dan pengelolaan air minum;
7. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
8. pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
9. penataan administrasi kependudukan;
10. fasilitasi administrasi pertanahan dan wilayah administrasi;

11. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
12. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
13. perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;
14. perencanaan pembangunan daerah; dan
15. perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana alam.

Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Program tersebut dilaksanakan oleh pihak RAPP, Tanoto Foundation dan Dompot Dhuafa.

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, lebih detailnya dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 1.

3.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target dan Indikator Tujuan 2TPB/SDGs

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan peliharaan dan spesies liar yang terkait.

Tabel 23. Target dan indikator Tujuan 2 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
2.1 Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1 * Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	na	5.10	4.50	4.00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	22,50 (2013)	18,2	20	20	Dinas Kesehatan
	2.1.2 * Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada	pm	pm	pm	pm	Dinas Ketahanan Pangan

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	Skala Pengamanan Kerawanan Pangan					
	2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	10.85 (2015)	5.10	4.50	4.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.2 Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025	2.2.1 * Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun / balita	36,8 (2013)	29,7	20	20	Dinas Kesehatan
	2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	na	21,3	20	20	Dinas Kesehatan
	2.2.2 * Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	pm	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	2.2.2. (a) Prevalensi anemia pada anemia ibu hamil	pm	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	51,2 (2013)	58	44	50	Dinas Kesehatan
	2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	94.90 (2016)	95.00	96.00	97.00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.3 Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.1 * Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	136,770.00 (2016)	157,286.00	165,150.00	173,407.00
2.5 Pada tahun 2020, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya	2.5.1 * Jumlah varietas unggul tanaman dan	pm	pm	pm	pm	Dinas Pertanian Tanaman

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
dan hewan peliharaan dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui manajemen dan diversifikasi benih serta bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, serta mendukung akses manfaat yang adil dan merata dengan adanya pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, komitmen internasional.	hewan untuk pangan yang dilepas					Pangan Hortikultura dan Perkebunan
	2.5.2 * Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	na	pm	pm	pm	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 2 TPB/SDGs

Dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs goal menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, maka pemerintah provinsi Riau telah menetapkan arah kebijakan dengan: Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan yang berkualitas; Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan; Meningkatkan nilai tukar petani; Menguatkan sistem dan data informasi pertanian dan perkebunan; Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan perkebunan; Meningkatkan kualitas pembangunan jaringan irigasi/rawa, drainase, turap tebing sungai dan pantai.

Program Tujuan 2 TPB/SDGs

Program yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam periode RPJMD 2014-2019 antara lain terkait dengan:

1. peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
2. perbaikan gizi masyarakat;
3. peningkatan ketahanan pangan;
4. peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan;
5. peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
6. peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
7. peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
8. peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
9. peningkatan produksi hasil peternakan; dan
10. fasilitasi administrasi pertanahan dan wilayah administrasi.

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB Tujuan 2.

3.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target dan Indikator Tujuan 3TPB/SDGs

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 11 target yang diukur melalui 38 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mengurangi angka kematian ibu; mengakhiri kematian bayi dan balita; mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan; mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular; memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat adiktif; menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi; mencapai cakupan kesehatan universal; mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat dari bahan kimia berbahaya; mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat; menyediakan akses obat dan vaksin dasar yang terjangkau; meningkatkan pembiayaan kesehatan; dan meningkatkan pengadaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Tabel 24. Target dan indikator Tujuan 3 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
3.1 Pada Tahun 2030, Mengurangi Angka Kematian Ibu Hingga Kurang Dari 70 Per 100.000 Kelahiran Hidup	3.1.1 *Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	131 (2016)	119	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.1.2 * Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	pm	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.1.2 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	pm	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
3.2 Pada 2030, Mengakhiri Kematian Bayi Dan Balita Yang Dapat Dicegah, Dengan Seluruh Negara Berusaha Menurunkan Angka Kematian Neonatal Setidaknya Hingga 12 Per 1.000	3.2.1 * Angka Kematian Balita (Akba) Per 1000 Kelahiran Hidup	28.90 (2016)	26.01	23.41	21.07	Dinas Kesehatan
	3.2.2 * Angka Kematian Neonatal	15.00 (2012)	13.50	12.15	10.94	Dinas Kesehatan

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
Kh Dan Angka Kematian Balita 25 Per 1.000	(AKN) per 1000 kelahiran hidup.					
	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	7.80 (2012)	7.02	6.32	5.69	Dinas Kesehatan
	3.2.2 (b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	16,67	16,67	100	100	Dinas Kesehatan
3.3 Pada Tahun 2030, Mengakhiri Epidemii Aids, Tuberkulosis, Malaria, Dan Penyakit Tropis Yang Terabaikan Serta Memerangi Hepatitis, Penyakit Bersumber Air, Dan Penyakit Menular Lainnya	3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa	pm	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.3.2. (a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	pm	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.3.3. * Kejadian malaria per 1000 orang	0,05	Kurang dari 1	Kurang dari 1	Kurang dari 1	Dinas Kesehatan
	3.3.3 (a) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria.	7.00 (2016)	7	8	9	Dinas Kesehatan
	3.3.4 (a) Persentase Kabupaten Kota yang melakukan deteksi dini hepatitis B	pm	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.3.5.* Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filariasis dan Kusta)	231 dan 167	240 dan 148	240 filariasis	240 filariasis	Dinas Kesehatan
	3.3.5. (b)Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I)	4 (2016)	12	12	12	Dinas Kesehatan
3.4 Pada Tahun 2030, Mengurangi Sepertiga Angka Kematian Dini Akibat Dari Penyakit Tidak Menular (Ncd), Melalui Pencegahan Dan Pengobatan, Serta Mempromosikan Kesehatan Mental Dan Kesejahteraan	3.4.1. (a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	pm	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	pm	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.4.1. (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	pm	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.4.2 * Angka kematian dari percobaan bunuh diri.	pm	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	3.4.2. (a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	pm	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
3.5 Memperkuat Pencegahan Dan Pengobatan Penyalahgunaan Zat, Termasuk Penyalahgunaan Narkotika Dan Penggunaan Berbahaya Alkohol	3.5.1 (a) Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	1,055.00 2017	949.5 0	854.5 5	769.10	BNN Provinsi
	3.5.1. (b) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	pm	pm	pm	pm	BNN Provinsi
	3.5.1 (c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	pm	pm	pm	pm	BNN Provinsi
	3.5.1 (d) Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	pm	pm	pm	pm	BNN Provinsi
	3.5.1 (e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	1,055.00 (2017)	949.5 0	854.5 5	769.10	Sekretariat Daerah BNN
3.7 Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Universal Terhadap Layanan Kesehatan Seksual Dan Reproduksi, Termasuk Keluarga Berencana, Informasi Dan Pendidikan, Dan Integrasi Kesehatan Reproduksi Ke Dalam Strategi Dan Program Nasional	3.7.1* Proporsi Wanita Usia Reproduksi (Usia 15-49) Yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana/Alat Kontrasepsi, Cara Modern	54,1 (2012)	55,1	56,2	57,3	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.1 (a) Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49	54,1 (SDKI, 2012)	60,3	60,7	60,9	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	tahun yang berstatus kawin					dan Keluarga Berencana
	3.7.1 (b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modren.	pm	pm	pm	Pm	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.2.* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	35 (SDKI, 2012))	27,2	19,4	19,4	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.2 (a) Total Fertility Rate	pm	pm	pm	pm	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, Termasuk Perlindungan Risiko Keuangan, Akses Kepada Pelayanan Kesehatan Dasar Berkualitas Dan Akses Kepada Obat-Obatan Dan Vaksin Dasar Yang Aman, Efektif, Dan Berkualitas Bagi Semua Orang	3.8.1 Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	4.63 (2015)	4.75	4.86	4.99	Dinas Kesehatan
	3.8.2 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	52 (2016)	53,3	54,6	56	Dinas Kesehatan
	3.8.2. (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	52.00 (2016)	53.30	54.63	56.00	Dinas Kesehatan
3.b Mendukung Penelitian Dan Pengembangan Vaksin Dan Obat Penyakit Menular Maupun Tidak Menular Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Negara-Negara Berkembang, Menyediakan Akses Obat Dan Vaksin Dasar Yang Terjangkau, Sesuai Doha Declaration Tentang Trips Agreement And Public Health, Yang Menegaskan	3.b.1 (a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	86	96,01	pm	Pm	Dinas Kesehatan

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
Hak Negara Berkembang Untuk Menggunakan Secara Penuh Ketentuan-Ketentuan Dalam Kesepakatan Atas Aspek-Aspek Terkait Perdagangan Pada Hak Properti Intelektual Terkait Keleluasaan Untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat, Dan Pada Khususnya, Menyediakan Akses Obat Bagi Semua Orang.						
3.c Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan Dan Pengadaan, Pengembangan, Pelatihan, Dan Penyimpanan Tenaga Kesehatan Secara Bermakna Di Negara-Negara Berkembang, Khususnya Negara-Negara Kurang Berkembang	3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	na	pm	pm	Pm	Dinas Kesehatan

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs

Untuk mewujudkan dan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia pada goal ketiga TPB/SDGs maka telah ditetapkan arah kebijakan dengan Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat; Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan masyarakat; Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan (Puskesmas rawat inap dan Pustu); Membangun sarana dan prasarana kesehatan; Meningkatkan kualitas proses pelayanan kesehatan; Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya kesehatan; Menguatkan sistem dan data informasi Kesehatan.

Program Tujuan 3 TPB/SDGs

Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan TPB/SDGs tujuan 3, program yang akan dilaksanakan OPD, mencakup:

1. program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
2. upaya kesehatan masyarakat;
3. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
4. upaya kesehatan masyarakat;
5. peningkatan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
6. program keluarga berencana;
7. pembiayaan kesehatan;
8. program obat dan perbekalan kesehatan; dan
9. pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya kesehatan.

3.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua

Target dan Indikator Tujuan 4 TPB/SDGs

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah; memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas; menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria terhadap pendidikan teknis kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau; peningkatan secara bermakna jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan; menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan; memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu mampu membaca dan menghitung; membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat dan gender; meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.

Tabel 25. Target dan indikator Tujuan 4 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1. *Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	pm	pm	pm	pm	Dinas Pendidikan
	4.1.1 (a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	pm	pm	pm	pm	Dinas Pendidikan
	4.1.1. (b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	pm	pm	pm	pm	Dinas Pendidikan
	4.1.1 (c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	28.20 (2016)	64,76	69,78	74,78	Dinas Pendidikan
	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sederajat.	112.89 (2016)	pm	pm	pm	Dinas Pendidikan Kabupaten/ Koa
	4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar	112.89 (2016)	pm	pm	pm	Dinas Pendidikan

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	(APK) SMP/MTs sederajat.					Kabupaten/ Kota
	4.1.1 (f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	95.34 (2016)	pm	pm	pm	Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
	4.1.1 (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	8.59 (2016)	8.69	8.67	8.72	Dinas Pendidikan
4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	pm	pm	pm	pm	Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria, terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas	4.3.1 (a) Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	79.18 (2016)	78,30	80,47	82,58	Dinas Pendidikan
	4.3.1 (b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	na	na	na	na	Dinas Pendidikan
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam kondisi rentan	4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT.	96,74 (SD) 78,53 (SMP) 62,76 (SMA) 25,10 (PT) (2016)	62,92 (SMA/SMK)	63,08 (SMA/SMK)	63,24 (SMA/SMK)	Dinas Pendidikan
4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki dan perempuan, mampu membaca dan menghitung	4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	99.07 (2016)	99.57	99.66	99.76	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	4.6.1 (b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24	99.89 (2016)	99.90	99.91	99.92	Dinas Pendidikan

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	tahun dan umur 15-59 tahun.					
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat dan gender, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	4.a.1 Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
	a. Akses Listrik	97.64 (2016)	98.13	98.23	98.32	Dinas Pendidikan
	b. Akses Internet SMA/SMK	86.60 (2016)	87.03	87.12	87.21	Dinas Pendidikan
4.c Pada tahun 2030, Secara bermakna meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS	4.c.1 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik.	na	39,78 (SMA) 35,59 (SMK)	44,78 (SMA) 35,59 (SMK)	49,78 (SMA) 40,59 (SMK)	Dinas Pendidikan

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tujuan ke empat TPB/SDGs maka telah ditetapkan arah kebijakan dengan: Meningkatkan Kuantitas SDM yang berkualitas; Meningkatkan Kualitas SDM pendidikan; Membangun sarana dan prasarana pendidikan; Meningkatkan kualitas proses pembelajaran; Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan dan Menguatkan sistem dan data informasi pendidikan.

Program Tujuan 4 TPB/SDGs

Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan diperlukan program-program yang terencana dengan baik. Program yang direncanakan dan diimplementasikan oleh OPD mencakup:

- (1) Program Bantuan Operasional Sekolah;
- (2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; dan
- (3) Program Pendidikan Menengah.

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB Tujuan 4.

3.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target dan Indikator Tujuan 5 TPB/SDGs

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 14 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan; menghapus praktik berbahaya; menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan; serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Tabel 26. Target dan indikator Tujuan 5 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun	5.1.1.* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	na	na	na	na	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual, dan berbagai jenis eksploitasi	5.2.1 *Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	na	na	na	na	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	5.2.2 *Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	na	na	na	na	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

	5.2.1 (a) Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	9.40 (2016)	8.46	7.61	6.85	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	na	na	na	na	Dinas Sosial
5.3 Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini dan paksa serta sunat perempuan	5.3.1 (a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	pm	pm	pm	pm	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.3.1. (b)Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	35 (SDKI, 2012)	27,2	19,4	19,4	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.3.1. (c)Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	79.18 (2016)	78,30	80,47	82,58	Dinas Pendidikan
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik	5.5.1 *Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	na	na	na	na	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	na	na	na	na	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.6 Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi yang disepakati sesuai dengan Program Aksi ICPD dan Beijing platform for Action serta	5.6.1.* Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan	pm	pm	pm	pm	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk

dokumen-dokumen hasil konvensi lainnya	pelayanan kesehatan reproduksi					dan Keluarga Berencana
	5.6.1 (a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KByang tidak terpenuhi).	11.80 (SDKI, 2012)	10,7	10,5	10.4	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	99.30 (2012)	99.80	99.90	100.00	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memadai, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan	5.b.1 *Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.	pm	pm	pm	pm	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs

Dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan pada Goal ke lima TPB/SDGs maka telah ditetapkan arah kebijakan dengan: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan seperti keikutsertaan kaum perempuan dalam berpolitik, pendidikan dan pekerjaan.

Program Tujuan 5 TPB/SDGs

Program dan kegiatan Rencana Aksi berasal dari berbagai OPD antara lain adalah:

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak;
2. Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial;
3. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan;
4. Program Keluarga Berencana; dan
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan.

Selain program di atas masih ada program lain yang memberikan kontribusi pada upaya pencapaian target TPB/SDGs yang berasal dari non-pemerintah yaitu dari

organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha, seperti yang tercantum dalam matrik terlampir.

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB Tujuan 5.

3.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Isu utama dalam Tujuan 6 adalah akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Sumber daya air diarahkan untuk pemenuhan air minum dan sanitasi maupun irigasi, guna menunjang ketahanan air dan pangan. Penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar saat ini belum menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi layak telah menunjukkan peningkatan, meskipun belum signifikan. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan akses dan sanitasi layak bahkan aman di masa mendatang.

Target dan Indikator Tujuan 6 TPB/SDGs

Tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak terdiri atas 6 (enam) target dan 27 indikator provinsi sebagai berikut:

Tabel 27. Target dan indikator Tujuan 6 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	36,26 (2015)	pm	pm	pm	Dinas PUPR
	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	68,51 (2015)	pm	pm	pm	Dinas PUPR
	6.1.1.(c)(*) Prosentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sumber air	59,21 (2015)	pm	pm	pm	PUPR

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	minum aman dan berkelanjutan.					
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a) (*) Proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	51,30 (2015)	pm	pm	pm	PUPR
	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	na	na	na	na	PUPR
	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	na	na	na	na	PUPR
	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	na	na	na	na	PUPR
	6.2.1.(e) Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	na	na	na	na	PUPR
	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	na	na	na	na	PUPR
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan	6.3.1 (a) Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan	na	na	na	na	PUPR

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).					
	6.3.1 (b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	na	na	na	na	PUPR
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	na	na	na	na	Dinas ESDM
	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	na	na	na	na	Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Satu Pintu
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Na	na	na	na	Bappeda/Dinas LHK
	6.5.1.(b) Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan	na	na	na	na	PUPR/ BMKG

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	updating dan revitalisasi.					
	6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	na	na	na	na	PUPR
	6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	na	na	na	na	Dinas LH dan Kehutanan
	6.5.1.(g) Kapasitas penataan kelembagaan sumber daya air.	na	na	na	na	PUPR
	6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	na	na	na	na	Dinas LH dan Kehutanan
	6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	na	na	na	na	Dinas LHK
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	na	na	na	na	Dinas LHK
	6.6.1.(b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	na	na	na	na	Dinas LHK
	6.6.1.(c) Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	na	na	na	na	Dinas LHK

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	na	na	na	na	Dinas LHK
	6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	na	na	na	na	Dinas LHK

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs

Dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan pada Goal ke lima TPB/SDGs maka telah ditetapkan arah kebijakan yaitu: Meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah; Meningkatkan partisipasi dan aksi nyata para pihak dalam konservasi sumber daya alam, pengendalian perubahan iklim, serta pemantauan bahan perusak ozon dan hujan asam; Melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan wilayah ekoregion serta menyusun RPPLH dan Status Lingkungan Hidup Daerah; Meningkatkan kualitas air dan kualitas udara serta tutupan hutan.

Program Tujuan 6 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD:

1. pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
2. perencanaan dan pengembangan hutan;
3. perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
4. pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
5. pengembangan lingkungan sehat;
6. pengendalian banjir;
7. pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
8. peningkatan fasilitas fungsi ke-PU-an;
9. penyediaan dan pengelolaan air minum;
10. penyehatan lingkungan permukiman; dan
11. pembinaan dan pengawasan geologi dan migas.

Adapun program, kegiatan, dan target kegiatan, secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB Tujuan 6.

3.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua

Energi dan listrik menjadi kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga strategi penyediaan serta distribusinya menjadi penting. Kebutuhan energi dan listrik akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi dan listrik yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan alternatif yang lebih berkelanjutan.

Target dan Indikator Tujuan 7 TPB/SDGs

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, energi dirumuskan di dalam Tujuan 7 yang bertujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini diterjemahkan ke dalam 2 (dua) indikator terkait listrik yaitu rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita.

Tabel 28. Target dan indikator Tujuan 7 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1. Rasio elektrifikasi	80,99%	84,26%	85,43%	87,33%	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	7.1.1. (a) Konsumsi listrik per kapita	74,09 KWh (2014)	Pm	pm	77,91 KWh	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 7 TPB/SDGs

Arah kebijakan umum yang terdapat pada RPJMD 2015-2019 adalah meningkatkan menyediakan energi listrik dan pemanfaatan pembangkit listrik serta membangun energi baru dan terbarukan.

Program Tujuan 7 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 7 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan kegiatan antara lain pengadaan dan pemasangan genset *solar home system* (SHS) beserta jaringannya; pembangunan PLTS terpusat; pengadaan pembangkit listrik tenaga micro hydro (PLTMH); pengadaan pembangkit tenaga biogas/bio mass/angin dan energi terbarukan lainnya; pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya di Provinsi Riau.

Adapun kegiatan, target kegiatan dan indikator secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 7.

3.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pada jangka waktu 5 tahun terakhir ini, PDB per kapita di Riau naik setiap tahunnya, walaupun pertumbuhannya mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi ini perlu terus diupayakan karena dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak. Salah satu upaya peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi.

Target dan Indikator Tujuan 8 TPB/SDGs

Tujuan 8 TPB/SDGs adalah mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Dalam rangka mencapai tujuan mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi; menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; menciptakan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi; mendorong dan mencapai pekerjaan tetap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua; mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan; dan memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik.

Tabel 29. Target dan indikator Tujuan 8 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1. Laju pertumbuhan PDRB perkapita	2,23%	1.96%	2.24%	2.52%	Bappeda
	8.1.1. (a) PDRB per kapita ADHB	Rp.80.25 Juta (tanpa migas) Rp. 104.96 (dengan migas)	83.61 106.68	87.35 108.77	91.35 111.21	Bappeda
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi	8.2.1*Laju pertumbuhan	Rp. 204.25	pm	pm	pm	Bappeda

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	juta (tanpa migas) Rp. 67.14 juta (dengan migas)				
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.* Pekerja informal sektor non pertanian	76.41%	pm	pm	pm	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	8.3.1. (a) Persentase Tenaga kerja formal	46,37%	pm	pm	pm	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	8.3.1. (b) Persentase tenaga kerja sektor informal pertanian	76,41%	pm	pm	pm	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	8.3.1. (c) Persentase UMKM memiliki akses ke keuangan formal	na	74%	75%	77%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1.* Upah rata-rata per jam pekerja	Rp. 15.097,54	pm	pm	pm	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	8.5.2.* Tingkat Pengangguran Terbuka	7,43%	6,85%	6,68%	6,60%	Dinas Tenaga Kerja & Kependudukan
	8.5.2. (a) Tingkat setengah pengangguran	na	na	na	na	Dinas Tenaga Kerja & Kependudukan
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1. Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	66.25 %	64.00			Dinas Tenaga Kerja & Kependudukan
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1 * Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	na	na	na	na	Bappeda Dinas Pariwisata
	8.9.1. (a) Jumlah wisatawan mancanegara	61.742 orang	92.087 orang	79.227 orang	88.044 orang	Dinas Pariwisata

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	8.9.1. (b) Jumlah wisatawan nusantara	na	na	na	na	Dinas Pariwisata
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.*Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	na	na	na	na	Bappeda
	8.10.1. (a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	na	na	na	na	

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs

Arah kebijakan umum yang terdapat pada RPJMD 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan pertanian dengan kebijakan:
 - a. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan;
 - b. Meningkatkan nilai tukar petani;
 - c. Memperkuat sistem dan data informasi pertanian dan perkebunan;
 - d. Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan perkebunan;
 - e. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan;
 - f. Meningkatkan daya saing industri berbasis pertanian dan perkebunan.
2. Meningkatkan pengelolaan kepariwisataan dengan kebijakan:
 - a. Membangun destinasi, sarana dan prasarana wisata;
 - b. Meningkatkan promosi wisata;
 - c. Mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif.
3. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan kebijakan:
 - a. Membangun sarana dan prasarana penunjang investasi;
 - b. Membangun kawasan industri;
 - c. Meningkatkan promosi investasi industri unggulan;
 - d. Meningkatkan sistem pengelolaan CSR melalui sinergitas swasta dengan pemerintah;
 - e. Meningkatkan daya serap tenaga kerja sesuai keahlian dan keterampilan tenaga kerja;
 - f. Mendorong peran swasta dan atau asosiasi dalam pengembangan kepariwisataan.

Program Tujuan 8 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
2. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
3. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar;
4. Program pengembangan wilayah transmigrasi;
5. Program transmigrasi local;
6. Program penguatan usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan;
7. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM;
8. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
9. Program penguatan sistem inovasi daerah (PSIDa);
10. Program peningkatan ketahanan pangan;
11. Program peningkatan kesejahteraan petani;
12. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
13. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
14. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
15. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
16. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
18. Program pengembangan budidaya perikanan;
19. Program pengembangan perikanan tangkap;
20. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
21. Program pengembangan sumber daya manusia perikanan dan kelautan;
22. Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK;
23. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
24. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
25. Program peningkatan kesempatan kerja;
26. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
27. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
28. Program pengembangan destinasi pariwisata;
29. Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
30. Program peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata;
31. Program pengembangan kemitraan pariwisata.

Adapun kegiatan, target kegiatan dan indikator secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 8.

3.9. Arah Kebijakan Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Tujuan 9 TPB/SDGs adalah membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Dengan memiliki infrastruktur yang cukup, industri akan berkembang pada berbagai wilayah, yang juga dapat menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kedua hal ini belum cukup jika tidak terus didukung oleh inovasi-inovasi yang mencari solusi yang berkelanjutan.

Dengan mencapai Tujuan 9 ini, Riau akan memiliki infrastruktur yang cukup, sektor industri yang kuat, serta terus melakukan inovasi dalam semua bidang, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang juga meningkatkan kesejahteraan rakyat serta melindungi lingkungan.

Target dan Indikator Tujuan 9 TPB/SDGs

Dalam rangka mencapai tujuan 9 ditetapkan 4 target yang diukur melalui 10 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mengembangkan infrastruktur yang berkualitas; mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan; meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan; dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 30. Target dan indikator Tujuan 9 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	9.1.2. (b) Jumlah dermaga penyeberangan	13	pm	pm	pm	Dinas Perhubungan
	9.1.2. (c) Jumlah pelabuhan strategis	77 (2015)	pm	pm	pm	Dinas Perhubungan
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di	9.2.1.* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	29,64%	pm	pm	pm	Dinas Perindustrian
	9.2.1. (a) Laju pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	8,25% (ADHB) 5,00% (ADHK)	pm	pm	pm	Dinas Perindustrian

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
negara kurang berkembang.						
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1. Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri	na	na	na	na	Dinas LHK
	9.4.1. (a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	na	na	na	na	
9.C Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.C.1 Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>	na	na	na	na	Dinas Komunikasi, Informasi & Statistik
	9.C.1. (a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	62,98% (rumah tangga)	pm	pm	pm	Dinas Komunikasi, Informasi & Statistik

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 9 TPB/SDGs

Arah kebijakan untuk pilar ekonomi TPB/SDGs mengacu pada RPJMD Provinsi Riau 2015-2019, khususnya terkait dengan industri, inovasi dan infrastruktur terdapat pada Misi Satu dan Misi Sembilan yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan peran swasta dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan, target dan indikator TPB/SDGs di atas, pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan arah kebijakan untuk tujuan tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pembangunan Jaringan Infrastruktur.
 - a. Meningkatkan kualitas pembangunan jalan dan jembatan (termasuk menuju ke kawasan pariwisata, industri, perbatasan);
 - b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung, keselamatan transportasi;
 - c. Meningkatkan kualitas pembangunan jaringan irigasi/rawa, drainase, turap tebing sungai dan pantai;
 - d. Memperkuat sistem dan data informasi infrastruktur dasar.
2. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
 - a. Membangun sarana dan prasarana penunjang investasi;
 - b. Membangun kawasan industri;
 - c. Meningkatkan promosi investasi industri unggulan.

Program Tujuan 9 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 9 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

1. rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan;
2. peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi;
3. pengembangan industri kecil dan menengah;
4. peningkatan kemampuan teknologi industri;
5. pengembangan industri kecil dan menengah;
6. peningkatan kemampuan teknologi industri;
7. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
8. perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
9. pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika;
10. pengembangan informasi dan komunikasi publik.

Adapun kegiatan, target kegiatan dan indikator secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 9.

3.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

Tujuan 10 dari TPB adalah mengurangi kesenjangan di dalam negara. Kesenjangan merupakan permasalahan global yang perlu ditangani dalam upaya menghapus kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Kesenjangan ini sendiri timbul dalam berbagai dimensi, sehingga pada Tujuan 10 ini tidak hanya menyentuh isu kesenjangan dalam bidang ekonomi saja namun juga kesenjangan dalam arti luas yaitu kesenjangan non-ekonomi, kesenjangan kesempatan dan kesenjangan horizontal.

Target dan Indikator Tujuan 10 TPB/SDGs

Tujuan Pengurangan kesenjangan yang terdiri dari 5 target dan 12 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih

tinggi; memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua; Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan sosial, upah dan perlindungan sosial serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar; dan memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia.

Tabel 31. Target dan indikator Tujuan 10 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1. Koefisien Gini	0,35	0,35	0,35	0,34	Bappeda
	10.1.1. (a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7,93%	Pm	pm	Pm	Bappeda
	10.1.1. (b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	na	na	na	Na	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	10.1.1. (c) Jumlah desa tertinggal	886 (2016)	716	636	556	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	10.1.1. (d) Jumlah Desa Mandiri	0 (2016)	10	10	10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	10.1.1. (f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	pm	pm	pm	Pm	Dinas Sosial
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1.* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen daei median pendapatan, menurut jenis kelamin dan para penyandang difabilitas	na	na	na	Na	
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil,	10.3.1. (a) Indeks Kebebasan Sipil					
	10.3.1. (c) Jumlah	na	na	na	Na	Bappeda KemenhukHAM

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)					
	10.3.1. (c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	na	na	na	Na	KemenhukHAM
	10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	na	na	na	Na	KemenhukHAM
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan 97ocial, upah dan perlindungan 97ocial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah	na	na	na	Na	Bappeda
	10.4.1.(b) Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	na	na	na	Na	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 10 TPB/SDGs

Dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs goal mengurangi kesenjangan, maka pemerintah provinsi Riau telah menetapkan arah kebijakan dengan meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan; meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan rumah tangga miskin; membangun infrastruktur dasar bagi rumah tangga miskin; mengurangi beban biaya rumah tangga miskin; mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli rumah tangga miskin; memperluas kesempatan kerja dan usaha rumah tangga miskin.

Program Tujuan 10 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 10 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

1. Program perencanaan pembangunan ekonomi
2. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
3. Program pembiayaan kesehatan
4. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
5. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
6. Program bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan social
7. Program peningkatan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

Adapun kegiatan, target kegiatan dan indikator secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 10.

3.11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Isu utama dalam Tujuan 11 adalah pembangunan kota yang terpadu; infrastruktur dan pelayanan perkotaan; pengurangan risiko bencana; dan perubahan iklim di perkotaan. Perlu mengembangkan kota dan permukiman yang berkelanjutan dalam mengatasi fenomena tersebut.

Target dan Indikator Tujuan 11 TPB/SDGs

Tujuan 11 kota dan permukiman berkelanjutan terdiri atas 8 target yang dijabarkan dalam 20 indikator. Target dan indikator TPB Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 32. Target dan indikator Tujuan 11 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.	11.1.1.(a) Prosentase jumlah rumah layak huni.	na	na	na	na	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP)
	11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	na	na	na	na	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP), Dinas PUPR
	11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota	na	na	na	na	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	baru yang terpenuhi SPP.					dan Pertanahan (PKPP), Dinas PUPR
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua	11.2 .1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	na	na	na	na	Dishub
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1 (a) Jumlah kota sedang yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	na	na	na	na	PUPR
	11.3.1 (b) Jumlah Metropolitan baru sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	na	na	na	na	PUPR
	11.3.2.(a) Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	na	na	na	na	Bappeda, PUPR

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	11.3.2. (b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	na	na	na	na	Dinas PUPR
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. yang aman secara global. daur ulang yang aman secara global.	11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	na	na	na	na	Dinas Kebudayaan, PUPR
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	na	na	na	na	Dinas Kesehatan, BPBD
	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia	147 (2013)	pm	pm	pm	BPBD
	11.5.1.(b)(*) Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	na	na	na	na	Dinas LHK,
	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	na	na	na	na	BPBD, Dinas LHK
	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	na	na	na	na	
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	na	na	na	na	PUPR, Dinas LHK
	11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	na	na	na	na	PUPR, Dinas LHK

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	na	na	na	na	PUPR, Dinas LHK
	11.7.2.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	na	na	na	na	Polda
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistic risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	na	na	na	na	BPBD
	11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	na	na	na	na	BPBD

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tujuan 11 dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs

Dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs tujuan pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di

perkotaan, maka pemerintah provinsi Riau telah menetapkan arah kebijakan dengan membangun infrastruktur pelayanan dasar seperti perumahan (rumah layak huni).

Program Tujuan 11 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

1. program pengembangan perumahan;
2. pembangunan infrastruktur pedesaan;
3. pembangunan jalan dan jembatan;
4. penataan bangunan dan lingkungan;
5. pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
6. penyehatan lingkungan permukiman;
7. pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
8. peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
9. peningkatan pelayanan angkutan umum;
10. pelestarian budaya;
11. pengelolaan keragaman budaya;
12. penanggulangan krisis kesehatan;
13. rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana alam;
14. pengendalian kebakaran hutan;
15. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
16. rehabilitasi hutan dan lahan.

Adapun kegiatan, target kegiatan dan indikator secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 11.

3.12. Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Isu utama dalam Tujuan 12 adalah pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan.

Target dan Indikator Tujuan 12 TPB/SDGs

Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab terdiri atas 4 target utama yang terdiri dari 5 indikator Provinsi Riau. Tujuan 12 TPB/SDGs adalah mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati; mengurangi pencemaran bahan kimia dan lingkungan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan; mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali; mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka; menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi

yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

Tabel 33. Target dan indikator Tujuan 12 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	88 (2015)	pm	pm	pm	Dinas LHK
	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	na	na	na	na	Dinas LHK
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	na	na	na	na	Dinas LHK
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	na	na	na	na	Dinas LHK, ESDM
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(b) Jumlah muatan lokal pendidikan yang berwawasan lingkungan.	na	na	na	na	Dinas Pendidikan

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs

Dalam mewujudkan tTPB/SDGs tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan, maka pemerintah provinsi Riau telah menetapkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup kualitas yaitu: meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah; melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan wilayah ekoregion; dan menyusun RPPLH dan Status Lingkungan Hidup Daerah.

Program Tujuan 12 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,
2. Program penyehatan lingkungan permukiman,
3. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Adapun kegiatan, target kegiatan dan indikator secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 12.

3.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Isu utama dalam Tujuan 13 adalah pengurangan risiko bencana, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Provinsi Riau memiliki risiko bencana yang tinggi, terutama bencana terkait iklim atau hidrometeorologi, seperti kebakaran lahan gambut. Oleh karena itu, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, termasuk perubahan iklim diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko atau bahaya yang ditimbulkannya.

Target dan Indikator Tujuan 13 TPB/SDGs

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah pengurangan risiko bencana, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tabel 34. Target dan Indikator Tujuan 13 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan	0	5	2	5	BPBD

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	risiko bencana (PRB) daerah					
	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPS: a. Meninggal: 4 (((2013))) b. Menderita 46.900 (((2013))) Bappenas: a. Meninggal: 4 (2015) b. Luka/Sakit: 1 (2015) c. Hilang: 0 (2015)	N/A	N/A	N/A	BPBD , Kesbangpolinmas
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1.(a) (*) Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau	1 Profil (2010)	N/A	N/A	N/A	Dinas LHK Dinas Bappeda

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs

Dalam mewujudkan TPB/SDGs tujuan pengurangan risiko bencana, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, maka pemerintah provinsi Riau telah menetapkan arah kebijakan upaya mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya telah dilakukan dengan menjalankan berbagai program.

Program Tujuan 13 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
2. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
3. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun kegiatan, target kegiatan dan indikator secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 13.

3.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Isu utama dalam Tujuan 14 adalah tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman dan pemberantasan *illegal fishing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil.

Target dan Indikator Tujuan 14 TPB/SDGs

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan dengan 4 target yang diukur melalui 5 indikator. Target-target tersebut terdiri dari : mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut; melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan; dan menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar.

Tabel 35. Target dan indikator Tujuan 14 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1.(a)(*) Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Keautan dan Perikanan
	14.2.1.(b)(*) Kesepakatan Pengelolaan SDI di RPP WPP 571 dan RPP WPP 711	2 WPP (2009)	2 WPP	2 WPP	2 WPP	Dinas Keautan dan Perikanan
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir	14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	40816 (2015)	Capaian: 269892 ha	269892,96 Ha	27957 7,61 Ha	Dinas Keautan dan Perikanan

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.						
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha	N/A	25,2% (capaian)	29%	29%	Dinas Keautan dan Perikanan
14.b Menyediakan akses untuk	14.b.1(b) Jumlah nelayan	7473 (2016)	16335 (capaian)	17835	19335	Dinas Keluatan dan Perikanan

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar.	yang terlindungi.					

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs

Sedangkan arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah: Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut; Mengembangkan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; dan Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan.

Program Tujuan 14 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

1. Program perencanaan tata ruang;
2. Program pengembangan perikanan tangkap;
3. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut;
4. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Adapun kegiatan, target kegiatan dan indikator secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 14.

3.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Target dan Indikator Tujuan 15 TPB/SDGs

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Dalam rangka mencapai tujuan tata kelola kehutanan, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara

berkelanjutan, menghentikan pengurungan, memulihkan lahan dan tanah kritis, dan mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.

Tabel 36. Target dan indikator Tujuan 15 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	na	na	na	na	Dinas LHK
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	na	na	na	na	Dinas LHK
	15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	na	na	na	na	Dinas LHK
	15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	na	na	na	na	Dinas LHK
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan pengurungan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang	15.3.1(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	na	na	na	na	Dinas ESDM

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.						

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs

Arah kebijakan untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan terdiri dari kebijakan tata kelola hutan, peningkatan konservasi dan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan nilai ekonomi kehati, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Program Tujuan 15 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

1. pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
2. perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
3. rehabilitasi hutan dan lahan;
4. perencanaan dan pengembangan hutan;
5. perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
6. penguatan usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan;
7. pengembangan budidaya perikanan;
8. pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

Adapun kegiatan, target kegiatan dan indikator secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 15.

3.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama (*enabling*) dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 mengacu pada tiga isu utama yaitu adanya perdamaian (*peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*justice*), serta keberadaan institusi yang tangguh (*strong institutions*).

Target dan Indikator Tujuan 16 TPB/SDGs

Tujuan 16 memiliki 8 target dan 32 indikator SDGs Riau yang ingin dicapai pada tahun 2030. Adapun target TPB tersebut adalah: mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun; menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak; menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional; menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya; mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat; menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan; memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran; memastikan akses publik pada informasi; dan melindungi kebebasan fundamental yang sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

Adapun indikator TPB/SDGs di Provinsi Riau untuk mencapai tujuan dan target yang sudah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Target dan indikator Tujuan 16 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun.	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	2015 49 Kasus	pm	pm	pm	Polda, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	NA	NA	NA	NA	Polda, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir.	2015 79.846 orang : L : 54.191 (67,87 %) P : 25.655 (32,13%)	pm	pm	pm	Polda, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	16.1.4.* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	2014 Proporsi : 73,57	pm	pm	pm	Polda, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan	16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak	2006 Pelaku Orang Tua : 66,01 %	pm	pm	pm	Polda, Kanwil Hukum dan HAM,

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Pelaku Non Orang Tua : 33,99 %				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	16.2.1.(b). Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	2006 2 % Laki-Laki, 1,8 % Perempuan	pm	pm	pm	Polda, Kanwil Hukum dan HAM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.3 Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	2014 3271 Kasus	pm	pm	pm	Polda
	16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	(2013) 20 Org (Litigasi) 25 Org (Non litigasi)	12	12	12	Kanwil Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah/Biro Hukum
	16.3.1.(c) Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	0	10	10	10	Kanwil Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah/Biro Hukum Pengadilan Negeri/Tinggi
	16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	0	0	0	0	Polda, Kejaksaan, Kanwil Hukum dan HAM
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	2014/Nasional Laki-laki : 3,6 Perempuan : 3,59	pm	pm	pm	Seluruh OPD

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	NA	NA	NA	NA	BPKAD & Bappeda
	16.6.1 (a) Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	(2016) WTP	WTP	WTP	WTP	Seluruh OPD
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	B (2016)	B	BB	A	Seluruh OPD (hasil penilaian KemenpanRB)
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	NA	100%	100%	100%	Seluruh OPD
	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah daerah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	((2013)) 0	C	B	B	Seluruh OPD
	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	NA	100% Tinggi	100% Tinggi	100% Tinggi	Seluruh OPD
	16.6.2.(b) Persentase	NA	100% Tinggi	100% Tinggi	100% Tinggi	Seluruh OPD

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	tingkat kepatuhan instansi pemerintah daerah terhadap rekomendasi Ombudsman.					
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.	2014 (27,69%) 18 orang perempuan dari 65 anggota DPRD Provinsi	27,69%	27,69%	30%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Sekretariat DPRD
	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	2017 (14,81%) 8 orang perempuan dari 54 Pejabat Eselon I dan II	14,81%	14,81%	30%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Kepegawaian Daerah
	16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi.	(2016) Indeks : 62,34	pm	pm	pm	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil.	(2016) Indeks : 71,78	pm	pm	pm	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik.	(2016) Indeks : 77,98	pm	pm	pm	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipi menurut umur	NA	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	16.9.1 (a) Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	NA	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	16.9.1.(b) Persentase anak	NA	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan,

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	yang memiliki akta kelahiran.					Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
16.10 Memastikan akses publik pada informasi dan melindungi kebebasan fundamental, yang sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	2017 49 OPD	100%	100%	100%	Seluruh OPD
	16.10.2.(b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	na	100%	100%	100%	Seluruh OPD
	16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	na	51	51	51	Seluruh OPD
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan	16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi	na	na	na	na	KemenhukHAM

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	menurut hukum HAM Internasional					

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs

Arah kebijakan Pilar Hukum dan Tata Kelola Provinsi Riau mengacu pada RPJMD Provinsi Riau 2015-2019, khususnya terkait dengan Misi 5: Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik. Untuk mencapai tujuan, target dan indikator TPB/SDGs di atas, Pemerintah Provinsi Riau mengembangkan arah kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan, yang meliputi:

1. Meningkatkan Sarana Prasarana Pemerintahan.
2. Meningkatkan KapasitasSDM Aparaturpemerintah.
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.
4. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas penyelenggararaan Pemerintah Daerah.
6. Menguatkan sistem administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Menguatkan sistem dan data informasi kependudukan.
8. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pengembangan kepariwisataan.
9. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Program Tujuan 16 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan;
2. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan;
5. Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
6. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri;
7. Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak;
9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Program Penataan tatalaksana;
15. Program Reformasi Birokrasi;
16. Program Pendidikan Kedinasan;
17. Program Penataan Kelembagaan;
18. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
19. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik;
20. Program Pelayanan Publik;
21. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
23. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Adapun kegiatan, target kegiatan dan indikator secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 16.

3.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Target dan Indikator Tujuan 17 TPB/SDGs

Tujuan menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan dengan memfokuskan pada upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari TPB 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 6 target dengan 15 indikator.

Target-target tersebut adalah memperkuat mobilisasi sumber daya domestik; meningkatkan kerjasama secara regional dan internasional; mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains; mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi; mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif; meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang; mengandalkan inisiatif yang sudah ada untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik.

Tabel 38. Target dan indikator Tujuan 17 SDGs Provinsi Riau

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi	17.1.1.* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	1,33%	pm	pm	Pm	Bapenda
	17.1.1.(a) Rasio pajak dan	0,47%	pm	pm	Pm	Bapenda

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	retribusi daerah terhadap PDRB					
	17.1.2.* Proporsi anggaran daerah yang didanai oleh pajak daerah	35,01%	Pm	Pm	pm	Bapenda
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan	na	na	na	na	Dinas Komunikasi, Informasi & Statistik
	17.6.2.(c) Tingkat penetrasi akses bergerak pitalebar (<i>mobile broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan	na	na	na	na	Dinas Komunikasi, Informasi & Statistik
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1. Proporsi individu yang menggunakan Internet	25,90%	pm	pm	Pm	Dinas Komunikasi, Informasi & Statistik
	17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	na	na	na	na	Dinas Komunikasi, Informasi & Statistik
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU	na	na	na	na	Bappeda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
	17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan	na	na	na	na	Bappeda

Target SDGs	Indikator SDGs Provinsi Riau	Tahun Dasar	2017	2018	2019	OPD
	proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam KPBU					
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	na	na	na	na	Bappeda
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	na	na	na	na	BPS
	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	na	na	na	na	BPS
	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	na	na	na	na	BPS

Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs

Dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs tujuan menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan, maka pemerintah

provinsi Riau telah menetapkan arah kebijakan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah, meningkatkan efisiensi dan produktifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan menguatkan sistem dan data informasi kependudukan.

Program Tujuan 17 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

1. peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
2. penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah,
3. pelayanan administrasi perkantoran,
4. peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
5. kerjasama pembangunan,
6. peningkatan dan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, peningkatan promosi dan kerjasama investasi,
7. peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi,
8. peningkatan promosi dan kerjasama investasi,
9. peningkatan kerjasama perdagangan internasional,
10. pengembangan data/informasi.

Adapun kegiatan, target kegiatan dan indikator secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Matriks Renaksi TPB/SDGs Tujuan 17.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian TPB dari waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian TPB yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah hingga pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan pelaksana TPB.

4.1. Landasan Hukum

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu kewajiban dari Tim Pelaksanaan TPB dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut di mana setiap Menteri/Kepala Lembaga dan juga Gubernur Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs Nasional.

Berdasarkan Diktum Kedua SK Gubernur Riau Nomor : Kpts. 187/II/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Riau Tahun 2017-2019 disebutkan bahwa Tim Pengarah menyampaikan laporan pencapaian TPB Provinsi Riau kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Tim Pelaksana mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian TPB Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan Kelompok Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Daerah untuk pencapaian TPB.

4.2. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi program Pencapaian TPB pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemantauan dan Evaluasi pada lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program serta mengukur dampak kebijakan dan program Pencapaian Target TPB.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi pencapaian TPB Provinsi Riau pada prinsipnya harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan non-pemerintah. Hasil Pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasi oleh Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Riau Tahun 2017 – 2019.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program pencapaian TPB adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau

seharusnya dapat dicapai. Dengan demikian akan diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Disamping prinsip tersebut di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang antara lain :

1. Pelaku pemantauan dan evaluasi adalah semua pelaku/*stakeholders* yang berkepentingan terhadap pencapaian target TPB di Provinsi Riau. Dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program pencapaian target TPB di Provinsi Riau adalah pemantau bagi program yang terkait langsung dengan pelaksana program dan kegiatan dan bagi pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Provinsi Riau bertanggung jawab mengkoordinasikan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pencapaian target TPB Provinsi Riau. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dilaksanakan sejak awal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pencapaian target TPB adalah seluruh sarana yang dimiliki oleh masing-masing pelaku, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan, sehingga para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang hasilnya dikaji bersama sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan pencapaian TPB selanjutnya.
4. Metode pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pencapaian target TPB ditentukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing dengan semangat memperbaiki kebijakan, program dan kegiatan pencapaian TPB yang sedang berjalan.

4.3. Tujuan/Kegunaan Pemantauan Dan Evaluasi

Tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui kemajuan pencapaian target TPB dari waktu ke waktu. Pemantauan ditekankan pada pengukuran kemajuan pencapaian dan perubahan atas satuan setiap target dan indikator TPB, termasuk di dalamnya mengetahui prestasi dan kendala pencapaian target dan indikator tertentu. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan pada anggaran yang telah direalisasikan dalam APBN dan APBD. Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan dipergunakan sebagai masukan untuk perbaikan perencanaan program dan kegiatan ke depan.

Ada dua kegunaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB yaitu:

1. Kegunaan terkait dengan operasional

Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencapai target TPB yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-

faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program Pencapaian SDGs yang dilakukan, melakukan perubahan-perubahan modifikasi dan supervisi terhadap kegiatan/program Pencapaian SDGs yang dilaksanakan, dan dapat mengembangkan tujuan-tujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi pelaporan kegiatan.

2. Kegunaan terkait dengan kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat dirumuskan kembali strategi pencapaian target TPB, pendekatan dan asumsi-asumsi yang digunakan. Selain itu, untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hubungan antar program dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi di masa mendatang.

4.4. Waktu Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan evaluasi percepatan pencapaian target TPB dibagi menurut waktu pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemantauan pada saat program dan kegiatan berjalan, dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
2. Evaluasi tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun.
3. Evaluasi akhir (*summative evaluation*), dilakukan pada akhir periode rencana aksi ini yaitu tahun 2019.

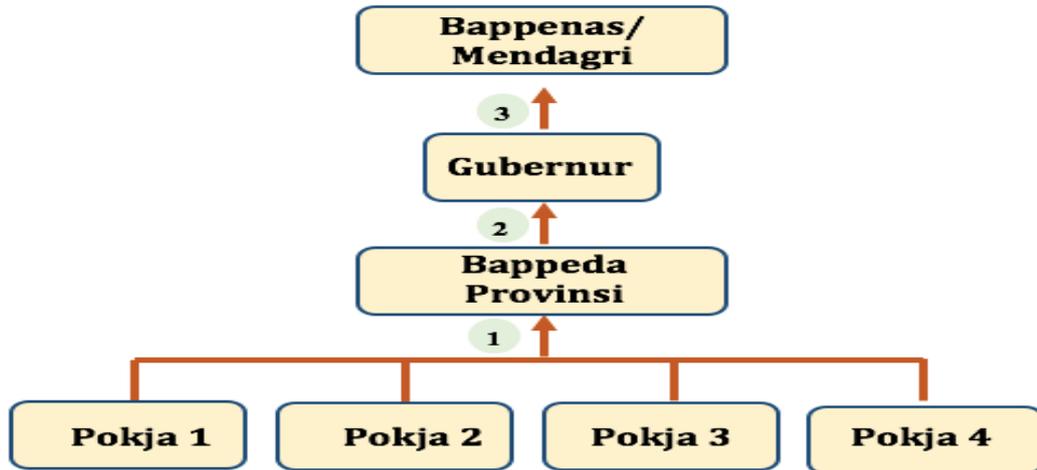
Dengan demikian kegiatan pemantauan dan evaluasi bukan merupakan kegiatan yang sekali saja dilakukan pada saat akhir program/kegiatan tetapi kegiatan yang bisa dilakukan sesuai tahapan yang dilaksanakan.

4.5. Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi

4.5.1. Mekanisme Pemantauan RAD

Kewajiban penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Sementara itu laporan pencapaian atas pelaksanaan target TPB Provinsi disampaikan oleh Gubernur setiap enam bulan sekali kepada Menteri PPN/Bappenas selaku koordinator Pelaksana TPB dan juga Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2. Adapaun alur pemantauan pelaksanaan TPB daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 16. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB Provinsi Riau



4.5.1.1. Alur Laporan

a. Langkah 1

Setiap enam bulan sekali, Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Propinsi Riau mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB yang dilakukan oleh Pokja 4 pilar dan kemudian menuangkannya ke dalam format matriks 2 yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan tersebut.

b. Langkah 2

Matriks konsolidasi dari semua pilar dilengkapi dengan penjelasan tentang kemajuan, kendala dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai standar yang telah dinyatakan dalam RAD dikirimkan kepada Gubernur Riau oleh Kepala Bappeda Provinsi selaku Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Riau.

c. Langkah 3

Gubernur menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Laporan yang sama juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat TPB nasional untuk koordinasi pelaporan RAD dari seluruh Provinsi.

4.5.1.2. Alur Umpan Balik

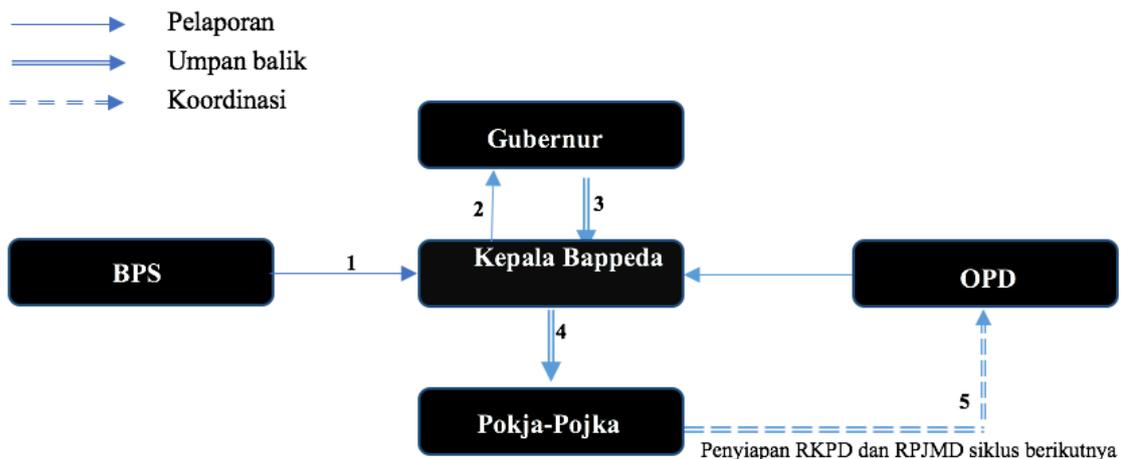
Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memwadahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas pencapaian indikator TPB yang dilaporkan oleh Gubernur Riau. Berdasarkan umpan balik dari Tim Pelaksana TPB nasional, Gubernur Riau memperbaiki atau merumuskan ulang program dan kegiatan pencapaian TPB daerah dan menuangkannya ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran untuk mendapatkan

kesepakatan dari DPRD dan kepada Bappeda sebagai arahan penyusunan program dan kegiatan periode berikutnya.

4.5.2. Mekanisme Evaluasi

Terdapat dua jenis evaluasi yaitu tahunan dan akhir periode. Kegiatan evaluasi tahunan dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Sedangkan evaluasi akhir periode dilaksanakan pada akhir periode RAD TPB yaitu tahun 2019. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB serta mencari jalan keluar atas kesenjangan yang terjadi antara standar pencapaian yang telah ditetapkan dan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Provinsi Riau. Adapun mekanisme yang diterapkan dalam proses evaluasi pada Provinsi Riau ada sebagai berikut:

Gambar 17. Mekanisme evaluasi RAD TPB Provinsi Riau



4.5.2.1. Alur laporan evaluasi

a. Langkah 1

Laporan evaluasi atas pencapaian indikator TPB utamanya datang dari BPS melalui berbagai survei yang mencakup Provinsi Riau. Di samping itu, laporan evaluasi diperoleh juga dari berbagai survei sektoral dan laporan-laporan administratif yang dilakukan oleh OPD.

Laporan evaluasi tersebut yang telah dipetakan ke dalam jenis-jenis indikator provinsi disampaikan Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Riau untuk dikonsolidasikan.

b. Langkah 2

Ketua Tim Pelaksana menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Gubernur sebagai Ketua Tim Pengarah untuk menjadi masukan evaluasi program dan kegiatan bagi pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

4.5.2.2. Alur Umpan Balik

a. Langkah 3

Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Riau mendapatkan arahan kebijakan dari Gubernur Riau sebagai Ketua Tim Pengarah terkait hasil evaluasi TPB Provinsi Riau untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan RPJMD periode berikutnya.

b. Langkah 4

Ketua Tim Pelaksana memberikan penjabaran arahan kebijakan untuk diintegrasikan dalam proses penyiapan RKPD dan RPJMD pada siklus berikutnya kepada Kelompok Kerja TPB Provinsi Riau.

c. Langkah 5

Kelompok Kerja merincikan umpan balik yang harus direncanakan dan dianggarkan oleh masing-masing OPD pada program dan kegiatan masing-masing.

4.6. Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Pihak Non Pemerintah

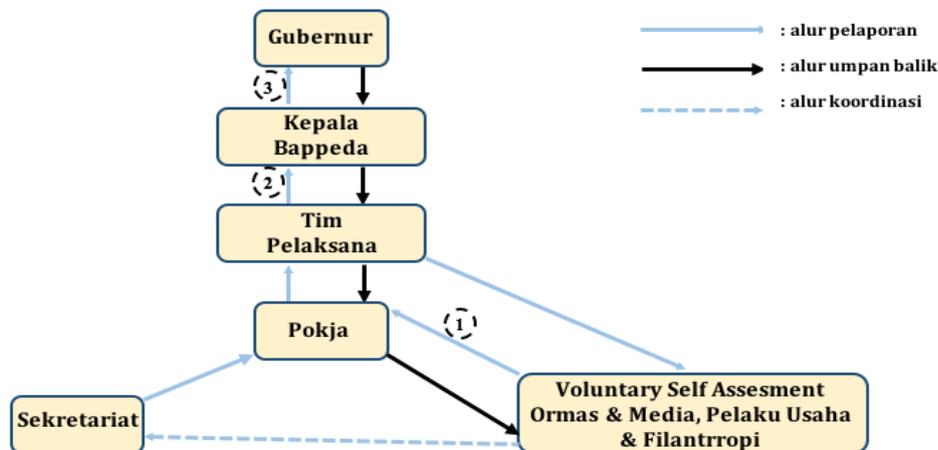
Mekanisme monitoring dan evaluasi pihak non pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi dan akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak non pemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kapasitas organisasi non pemerintah sangat beragam, maka perlu dirumuskan mekanisme pelaporan yang sederhana dan efisien, namun tetap tidak mengurangi esensi hal yang dikerjakan.

Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.

Adapun alur informasi pemantauan dan evaluasi dari organisasi non pemerintah adalah sebagai berikut, seperti digambarkan dalam bagan :

Gambar 18. Alur Informasi Evaluasi untuk RAD TPB Provinsi Riau Non-Pemerintah



5.6.1. Alur Laporan

a. Langkah 1

Organisasi Non Pemerintah melakukan *voluntary self assesment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self assesment tool*, lalu dilaporkan pada Kelompok Kerja pada pilar yang sesuai dengan isu lembaga dimaksud dan/atau disampaikan juga kepada Sekretariat TPB Provinsi Riau.

b. Langkah 2

Kelompok Kerja atau Sekretariat TPB Provinsi Riau menerima laporan dari Organisasi Non Pemerintah untuk diolah, divalidasi dan direkapitulasi yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda Riau selaku Ketua Tim Pelaksana.

c. Langkah 3

Tim Pelaksana merangkum keseluruhan laporan baik dari pemerintah maupun non pemerintah ke dalam suatu laporan yang utuh yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Riau selaku Ketua Tim Pengarah.

5.6.2. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk mewedahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja non pemerintah yaitu : kelompok Kerja dibantu Sekretariat

akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Organisasi Non Pemerintah jika terdapat kekuranglengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.

Mekanisme evaluasi untuk Organisasi Non Pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Organisasi Non Pemerintah itu sendiri yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para personel yang diakui kompetensi, pengalaman dan integritasnya dari stakeholder berkaitan.

Forum atau tim tersebut juga melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah serta perwakilan lain bila diperlukan dari penilai independen berdasarkan kompetensinya, misalnya pakar keuangan, manajemen, ahli evaluasi dampak, dan lain-lain.

Hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Kelompok Kerja yang kemudian akan diserahkan kepada Ketua Tim Pelaksana sebagai bahan evaluasi keseluruhan dari para stakeholder. Ketua Tim Pelaksana akan menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Tim Pengarah.

Ketua Tim Pengarah akan memberikan umpan balik yang bersifat strategis kepada para stakeholder untuk pencapaian TPB yang lebih optimal. Ketua Tim Pelaksana akan memberikan umpan balik penjabaran dari arahan kebijakan strategis dari Ketua Tim Pengarah kepada Kelompok Kerja, yang akan dilanjutkan disampaikan kepada Organisasi Non Pemerintah terkait.

4.7. Publikasi Hasil Pemantauan Dan Evaluasi

Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh Sekretariat TPB telah menyiapkan laman sdgs.bappenas.go.id sebagai media publik untuk melakukan disseminasi informasi terkait dengan Peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB, dokumen dan informasi publik lainnya.

Laman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi, hasil pemantauan dan evaluasi berkala atas kemajuan pencapaian TPB Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Riau ini disusun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, hal ini sesuai dengan prinsip inklusif dan partisipatif dalam TPB/SDGs.

Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Riau berisi arah kebijakan dan target yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan non pemerintah secara bersama-sama dengan menekankan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs yaitu integrasi dan no one left behind (tidak ada satupun yang tertinggal).

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dokumen RAD ini juga dilengkapi dengan lampiran Matrik Program dan Kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendukung pencapaian TPB/SDGs.

Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Riau ini telah dikonsultasikan publikkan bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Riau, namun sebagai sebuah dokumen yang bersifat terbuka maka masih diperlukan masukan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah.
